

**JAMINAN SOSIAL SUMBERDAYA MANGROVE DI PANCER CENGRONG
TERHADAP MASYARAKAT DESA KARANGGANDU KECAMATAN
WATULIMO, KABUPATEN TRENGGALEK, PROVINSI JAWATIMUR**

SKRIPSI

PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Oleh :

RATNA PUSPANINGTYAS

NIM. 115080407113006

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

**JAMINAN SOSIAL SUMBERDAYA MANGROVE DI PANCER CENGRONG
TERHADAP MASYARAKAT DESA KARANGGANDU KECAMATAN
WATULIMO, KABUPATEN TRENGGALEK
JAWATIMUR**

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh :
RATNA PUSPANINGTYAS
NIM. 115080407113006



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

**JAMINAN SOSIAL SUMBERDAYA MANGROVE DI PANCER CENKRONG
TERHADAP MASYARAKAT DESA KARANGGANDU, KECAMATAN
WATULIMO, KABUPATEN TRENGGALEK, PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh:

RATNA PUSPANINGTYAS

NIM. 115080407113006

telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 8 Desember 2015
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
SK Dekan No. :
Tanggal :

Dosen Penguji I

Dr. Ir. Agus Tjahjono, MS

NIP. 196308201 98802 1 001

Tanggal :

Dosen Penguji II

Tiwi Nurjannati Utami, S.Pi, MM

NIP. 19750322 200604 2 002

Tanggal:

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Erlinda Indrayani, S.Pi,M.Si

NIP.19740220 200312 2 001

Tanggal :

Dosen Pembimbing II

Dr. Ir. Edi Susilo, MS

NIP.19591205 198503 1 003

Tanggal:

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

(Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP)

NIP 19610417 199003 1 001

Tanggal :

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Malang, 8 November 2015

Mahasiswa

RATNA PUSPANINGTYAS



UCAPAN TERIMAKASIH

Banyak sekali pihak-pihak yang memberikan semangat, bantuan, bimbingan, dan masukan yang tidak dilupakan. Oleh karena itu, secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

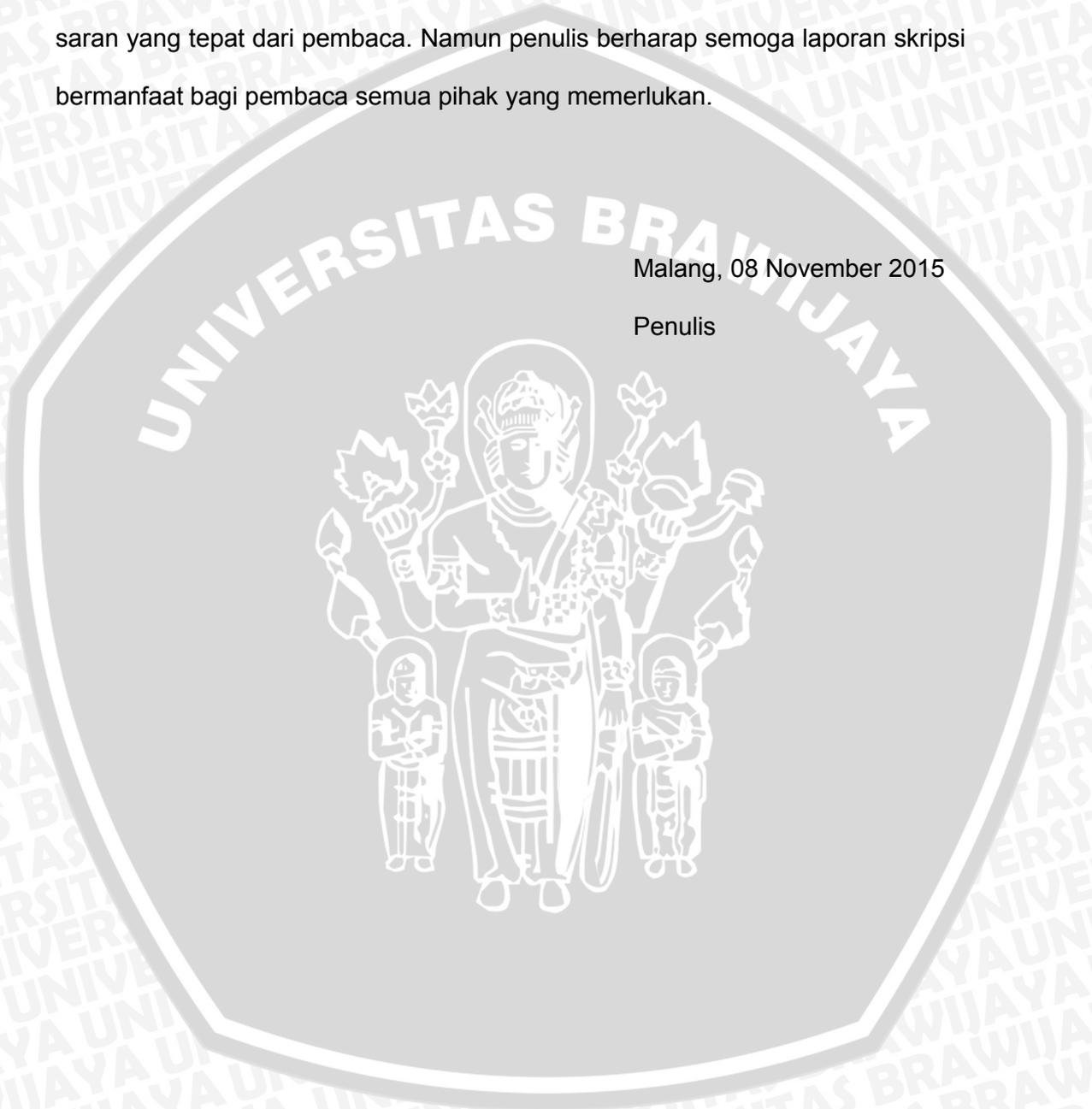
1. Allah SWT Sang Pemilik Pengetahuan, yang selalu memberikan berkah yang tidak ternilai dan selalu memberikan kekuatan kepada penulis dalam menghadapi segala kesulitan selama penyusunan skripsi ini berlangsung.
2. Sujud dan terimakasih yang mendalam penulis persembahkan kepada mama tercinta atas doa dan kerja keras dalam membesarkan penulis hingga sampai pada titik ini. Yang setiap hari sms dan telpon penulis agar cepat menyelesaikan skripsi.
3. Mas Hendri dan mbak Ika yang selalu menghibur penulis saat penulis jenuh dan selalu memberikan semangat
4. Ibu Erinda Indrayani, S.Pi, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Dr. Ir. Edi Susilo, MS selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berharga dari awal penulisan sampai akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Teman-teman seperjuangan terimakasih atas cerita dan pengalaman yang bermakna semasa perkuliahan. Kepada kawan-kawanku, Nanda, Chintya, Riri, Ema, Lusi, Agung, Arifin, Yuda, Wima, Ogi, dan Inung, terimakasih kawan.
6. Kepada Raga Yustia, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan skripsi. Terimakasih banyak Raga.
7. Kepada seluruh keluarga di Cengkong (POKMASWAS Kejung Samudra), terimakasih telah menjadi rumah kedua bagi penulis.

8. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang tepat dari pembaca. Namun penulis berharap semoga laporan skripsi bermanfaat bagi pembaca semua pihak yang memerlukan.

Malang, 08 November 2015

Penulis



RINGKASAN

Ratna Puspaningtyas. Skripsi Dengan Judul Jaminan Sosial Sumberdaya Mangrove di Pancer Cengkong Terhadap Masyarakat Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur (Dibawah bimbingan **Erinda Indrayani, S.Pi, M.Si** dan **Dr. Ir. Edi Susilo, MS**)

Hutan mangrove yang memiliki potensi ekonomis selalu menjadi rebutan masyarakat untuk mengolah, menguasai dan mengeksploitasi secara berlebihan sehingga banyak diantara hutan-hutan mangrove tersebut menjadi rusak bahkan punah sama sekali, demikian halnya hutan mangrove yang berada di Pancer Cengkong Desa Karanggandu Trenggalek, pada tahun 2003 terjadi kerusakan besar akibat adanya penebangan liar dan kegiatan yang paling banyak merusak hutan mangrove di Desa Karanggandu adalah pencurian kayu bakau sebagai bahan mentah pembuatan arang dan pengolahan kayu balok (bakau).

Sumberdaya alam merupakan salah satu sumber jaminan sosial utama bagi penduduk pedesaan. Kebijakan jaminan sosial secara resmi biasanya berasumsi bahwa komunitas lokal masih merupakan penyokong yang kuat bagi jaminan sosial. Khususnya bagi masyarakat pedesaan. Yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh suatu masyarakat merupakan kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Contoh kearifan masyarakat yang tumbuh dan berkembang pada daerah tertentu di Indonesia antara lain Sasi Laut di Maluku, Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam, dan Tradisi Awig-Awig di Nusa Penida Bali.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari : (1) Aktifitas-aktifitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat Pancer Cengkong sebagai jaminan sosial sumberdaya mangrove untuk tetap dapat bertahan hidup. (2) Peran pemerintah terhadap keberlanjutan sumberdaya mangrove di Pancer Cengkong Desa Karanggandu dan (3) Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan jaminan sosial sumberdaya mangrove dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian rumah tangga

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Masyarakat Karanggandu dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan potensi yang dimiliki sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumberdaya alam yang dimanfaatkan berupa hutan mangrove yang memiliki manfaat baik secara langsung dan tidak langsung bagi masyarakat. Aktifitas-aktifitas ekonomi yang dilakukan masyarakat Karanggandu sebagai jaminan sosial sumberdaya mangrove adalah Ekowisata, Budidaya kepiting bakau, Budidaya kerang darah dan kijing, Pengolahan buah mangrove dan Pembibitan.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan beberapa proyek rehabilitasi untuk menjaga kelestarian sumberdaya mangrove khususnya di daerah Pancer Cengkong Desa Karanggandu. melalui penanaman 6.000 batang pada tahun 2002, 15.000 batang pada tahun 2007, 10.000 batang pada tahun 2008, 15.000 batang pada tahun 2009, 10.000 batang pada tahun 2010 dan pada tahun 2014 menanam sebanyak 7.000 batang. Selain penanaman pohon, Dinas Perikanan dan Kelautan juga melakukan budidaya kepiting bakau mulai tahun 2010 s/d sekarang serta penanaman cemara udang pada tahun 2011

sampai dengan sekarang dan pembangunan jembatan ekowisata hutan mangrove pada bulan Juli 2011.

Upaya pengelolaan kawasan hutan mangrove dapat berjalan dengan baik karena adanya partisipasi masyarakat dan kerjasama kelompok masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal dengan tegas terhadap perusakan kawasan hutan mangrove. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan sumberdaya mangrove maka masyarakat Desa Karanggandu membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas dalam bidang pelestarian hutan mangrove dengan nama lembaga "Kejung Samudra". Mereka membuat perencanaan pengelolaan wilayah perlindungan melalui keputusan bersama, mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan wilayah yang dilindungi untuk kepentingan bersama, saling melapor apabila terjadi pelanggaran dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melanggar. Masyarakat yang sadar akan pentingnya hutan mangrove mulai meninggalkan aktifitas-aktifitas yang dapat merusak kelestaraan ekosistem mangrove.

Dengan adanya suatu sistem pengelolaan secara berkelanjutan maka diharapkan sumberdaya mangrove yang ada di Desa Karanggandu tetap lestari dan didukung akses yang luas terhadap sumberdaya mangrove yang tersedia maka jaminan sosial yang terbentuk dalam masyarakat akan berkelanjutan



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT atas semua izin dan ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul “Jaminan Sosial Sumberdaya Mangrove di Pancer Cengkong Terhadap Masyarakat Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur”. Pada skripsi ini, disajikan pembahasan yang meliputi : aktifitas-aktifitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat sebagai jaminan sosial sumberdaya mangrove, peran pemerintah dan masyarakat terhadap keberlanjutan sumberdaya mangrove di Pancer Cengkong. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan pada program studi Agrobisnis Perikanan, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan di Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari dalam pelaksanaan dan penulisan laporan skripsi ini dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah berusaha untuk lebih teliti, tetapi laporan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang tepat dari pembaca dan penulis berharap semoga laporan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca atau semua pihak yang memerlukan.

Malang, 08 Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMBUNG.....	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Mangrove	7
2.1.1 Fungsi dan Manfaat Mangrove	7
2.1.2 Penyebab Kerusakan Mangrove	8
2.1.3 Potensi Ekonomi Ekosistem Mangrove	9
2.2 Jaminan Sosial	11
2.3 Jaminan Sosial Sumberdaya Alam	11
2.4 Berbagai Adat yang Melindungi Sumberdaya	14
2.4.1 Sasi Laut di Maluku	15
2.4.2 Panglima Laot Nanggroe Aceh Darussalam	16
2.4.3 Tradisi Awig-Awig di Nusa Penida Bali	19
2.5 Pengelolaan Sumberdaya Mangrove	21
2.6 Pengelolaan Berbasis Masyarakat	22
2.7 Penelitian Terdahulu	23
2.8 Kerangka Berpikir	27
3. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	29
3.2 Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif	29
3.3 Sumber Data	30
3.3.1 Data Primer	30
3.3.2 Data Sekunder	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.4.1 Observasi	31
3.4.2 Wawancara	32
3.4.3 Dokumentasi	32
3.5 Studi Pustaka	33
3.6 Metode Pengambilan Sampel	33
3.7 Analisa Data	34

4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Letak Geografis dan Topografi Desa Karanggandu	37
4.2 Keadaan Penduduk.....	37
4.2.1 Jenis Kelamin	38
4.2.2 Berdasarkan Usia.....	38
4.2.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	39
4.2.4 Berdasarkan Mata Pencaharian	40
4.3 Keadaan Umum Perikanan Desa Karanggandu	41
5. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Jaminan Sosial Sumberdaya Mangrove	42
5.1.1 Aktifitas-Aktifitas Ekonomi	46
5.2 Peran Pemerintah Dalam Bidang Pengelolaan Mangrove	51
5.3 Upaya Masyarakat Meningkatkan Sumberdaya Mangrove	55
6. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	64
6.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68



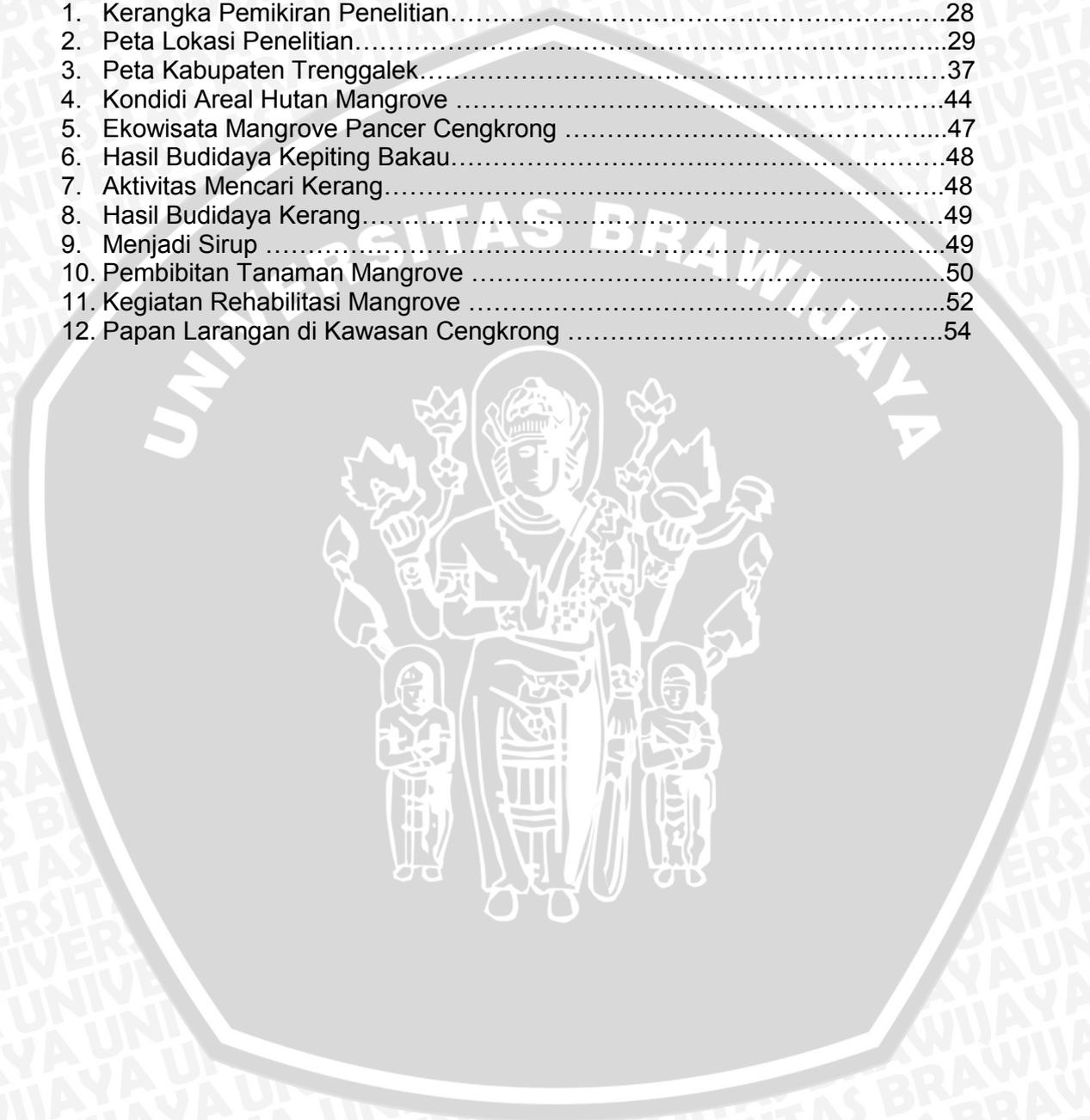
DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	38
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	39
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	40
5. Proyek Rehabilitasi Mangrove	51
6. Perkembangan Anggota POKMASWAS	60
7. Sarana POKMASWAS	61



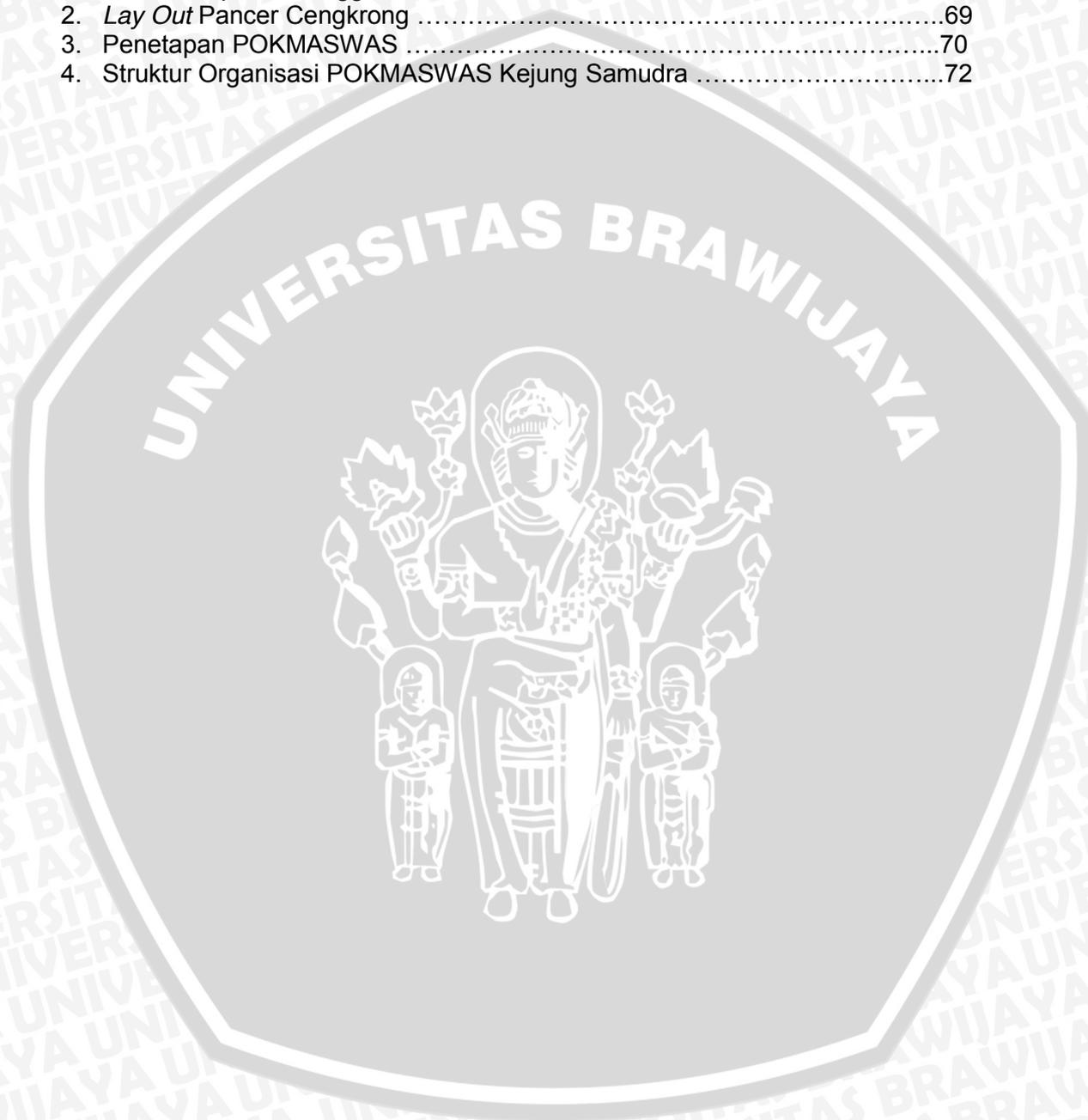
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	28
2. Peta Lokasi Penelitian.....	29
3. Peta Kabupaten Trenggalek.....	37
4. Kondidi Areal Hutan Mangrove	44
5. Ekowisata Mangrove Pancer Cengkong	47
6. Hasil Budidaya Kepiting Bakau.....	48
7. Aktivitas Mencari Kerang.....	48
8. Hasil Budidaya Kerang.....	49
9. Menjadi Sirup	49
10. Pembibitan Tanaman Mangrove	50
11. Kegiatan Rehabilitasi Mangrove	52
12. Papan Larangan di Kawasan Cengkong	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Kabupaten Trenggalek	68
2. <i>Lay Out</i> Pancer Cengkong	69
3. Penetapan POKMASWAS	70
4. Struktur Organisasi POKMASWAS Kejung Samudra	72



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.508 dan didukung oleh garis pantai kurang lebih 81.000 km, garis pantai yang panjang ini menunjukkan bahwa Negara ini memiliki sumberdaya pesisir potensial, baik sumber daya hayati maupun non hayati. Diantara beberapa sumber daya hayati itu seperti hutan mangrove, perikanan, terumbu karang dan lain sebagainya. Mangrove adalah vegetasi yang tumbuh diantara garis pasang surut, tetapi vegetasi tersebut juga tumbuh di pantai karang yaitu pada koral mati yang di atasnya ditimbuni selapis tipis pasir atau ditimbuni lumpur (R. Atmawidjaya, 1986).

Wilayah pesisir Indonesia memiliki luasan dan potensi ekosistem mangrove yang cukup besar. Dari sekitar 15.900 juta ha hutan mangrove yang terdapat di dunia, 27% atau 4.293 juta ha berada di Indonesia (Kusmana, 1995). Namun demikian, luas hutan mangrove di Indonesia terus menyusut, hal ini sesuai dengan hasil penafsiran potret udara dan survey lapangan yang menyatakan bahwa luasan hutan mangrove di Indonesia tahun 1982 sekitar 4.251.011 ha (Direktorat Bina Program 1982). Hasil penafsiran 1991 dari Citra Landsat MSS liputan tahun 1986-1991 (luas areal liputan hutan 150 juta ha) dan data referensi lainnya seperti peta Repport, data SPOT, dan potret udara yang dilakukan (Lintang 1993), luas hutan mangrove di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan seluas 3.735.250 ha. Artinya, luas mangrove di Indonesia telah mengalami degradasi sekitar 13% atau 515.761 ha dalam waktu kurang lebih 11 tahun.

Upaya rehabilitasi daerah pesisir pantai dengan penanaman jenis mangrove sebenarnya sudah dimulai sejak tahun sembilan-puluhan. Data

penanaman mangrove oleh Departemen Kehutanan selama tahun 1999 hingga 2003 baru terealisasi seluas 7.890 ha (Departemen Kehutanan, 2004), namun tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Data ini menunjukkan laju rehabilitasi hutan mangrove hanya sekitar 1.973 ha/tahun. Masyarakat juga tidak sepenuhnya terlibat dalam upaya rehabilitasi mangrove, dan bahkan dilaporkan adanya kecenderungan gangguan terhadap tanaman mengingat perbedaan kepentingan.

Hutan mangrove yang memiliki potensi ekonomis selalu menjadi rebutan masyarakat untuk mengolah, menguasai dan mengeksploitasi secara berlebihan sehingga banyak diantara hutan-hutan mangrove tersebut menjadi rusak bahkan punah sama sekali, demikian halnya hutan mangrove yang berada di Pancer Cengkong Desa Karanggandu Trenggalek pada tahun 2003 terjadi kerusakan besar akibat adanya penebangan liar dan kegiatan yang paling banyak merusak hutan mangrove di Desa Karanggandu adalah pencurian kayu bakau sebagai bahan mentah pembuatan arang dan pengolahan kayu balok (bakau). Kegiatan tersebut akhirnya mengakibatkan perubahan pada hutan mangrove, perubahan tersebut berupa berkurangnya luasan mangrove, jumlah ikan, kepiting, aneka jenis kerang berkurang serta pembukaan hutan mangrove yang dijadikan lahan pertambakan udang. Kerusakan hutan mangrove mencapai 50% dengan luas area hutan mangrove sekitar 87 ha mengakibatkan berkurangnya mata pencaharian penduduk. Kurun waktu 5 tahun kerusakan hutan mangrove dibiarkan begitu saja hingga pulih kembali hingga 80% dari lahan yang ada. Pada tahun 2008 sebagian masyarakat mulai sadar akan pentingnya hutan mangrove, sehingga dilakukan reboisasi seluas 1 ha (Pokmaswas Kejung Samudera, 2010).

Perubahan-perubahan tersebut memiliki dampak yang sangat penting dalam kaitannya dengan sumberdaya alam dan jaminan sosial. Sumberdaya

alam merupakan salah satu sumber jaminan sosial utama bagi penduduk pedesaan. Kebijakan jaminan sosial secara resmi biasanya berasumsi bahwa komunitas lokal masih merupakan penyokong yang kuat bagi jaminan sosial. Khususnya bagi masyarakat pedesaan. Tatanan jaminan sosial dalam masyarakat bukan sepenuhnya tidak ada, akan tetapi lingkaran dukungan yang diberikan semakin melemah sejalan dengan semakin meningkatnya kondisi persaingan, bahkan cenderung berakhir pada kondisi yang sulit. Meningkatnya ketimpangan akses terhadap sumberdaya alam, serta perubahan hubungan kerja, secara substansional mengubah situasi jaminan sosial bagi penduduk miskin pedesaan. Oleh karena itu, hubungan-hubungan sosial di pedesaan saat ini harus dilihat seperti halnya dalam konteks kesempatan-kesempatan di perkotaan (Benda-Beckman, 2001). Selain itu Benda-Beckman (1994) mendefinisikan jaminan sosial sebagai upaya-upaya individu, kelompok sosial, atau organisasi untuk menanggulangi ketidakpastian yang menyangkut eksistensi mereka, yaitu berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan air dan makanan, tempat perlindungan, pemeliharaan dan kesehatan fisik mental, serta pendapatan dan pendidikan. Jadi sumberdaya alam merupakan jaminan sosial bagi masyarakat yang diperlukan suatu pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan agar tetap terjamin.

Masyarakat memiliki nilai-nilai sosial, adat istiadat maupun kebiasaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga memiliki jaminan sosial yang berbeda pula. Perbedaan dalam hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya. Sumberdaya alam di dunia jumlahnya tetap sedangkan populasi manusia makin berkembang, oleh karena itu sumberdaya harus dikelola dan dimanfaatkan searif dan sebijak mungkin agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh suatu

masyarakat merupakan kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Contoh kearifan masyarakat yang tumbuh dan berkembang pada daerah tertentu di Indonesia antara lain Sasi Laut di Maluku, Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam, dan Tradisi Awig-Awig di Nusa Peninda Bali.

Pengelolaan sumberdaya mangrove telah dilakukan masyarakat untuk menyikapi tekanan sosial ekonomi dan kemiskinan yang dihadapinya. Penelitian yang dilakukan pada masyarakat di Pancer Cengkong Desa Karanggandu Trenggalek ini penting untuk melihat aktifitas-aktifitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat Pancer Cengkong sebagai jaminan sosial sumberdaya mangrove dan peran pemerintah terhadap keberlanjutan sumberdaya mangrove. Selain itu upaya yang dilakukan masyarakat nelayan untuk mengembangkan jaminan sosial sumberdaya mangrove dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian rumah tangganya

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian yang dilakukan pada masyarakat di Pancer Cengkong Trenggalek khususnya kawasan hutan mangrove ini penting untuk melihat aktifitas-aktifitas masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya mangrove yang diakibatkan meningkatnya produksi kepiting bakau, kerang darah, kerang totok (kijing), dan terbukanya kawasan wisata hutan mangrove. Keseluruhannya berakibat pada perbaikan sosial ekonomi masyarakat di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Apa saja aktifitas-aktifitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat Pancer Cengkong sebagai jaminan sosial sumberdaya mangrove untuk tetap dapat bertahan hidup?

2. Bagaimana peran pemerintah terhadap keberlanjutan sumberdaya mangrove di Pancer Cengkong Desa Karangandu?
3. Apa saja upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan jaminan sosial sumberdaya mangrove dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Aktifitas-aktifitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat Pancer Cengkong sebagai jaminan sosial sumberdaya mangrove untuk tetap dapat bertahan hidup
2. Peran pemerintah terhadap keberlanjutan sumberdaya mangrove di Pancer Cengkong Desa Karangandu
3. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan jaminan sosial sumberdaya mangrove dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian rumah tangga

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan peneliti :

1. Masyarakat

Sebagai bahan informasi untuk tetap menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan sumberdaya mangrove, sehingga dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk generasi penerus.

2. Pemerintah

Dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan hutan mangrove dimasa yang akandatangdan pengembangan potensi sumberdaya mangrove di

pancer cengkong dengan melihat keseimbangan manfaat ekologi dan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta menambah pendapatan asli daerah setempat

3. Peneliti

Menambah informasi, pengetahuan dan penelitian lebih dalam tentang jaminan sosial sumberdaya mangrove



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mangrove

Beberapa ahli mendefinisikan istilah “mangrove” berbeda-beda, tetapi pada dasarnya merujuk pada pengertian yang sama. Bengen (1998) menyebutkan bahwa hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Komunitas vegetasi ini umumnya tumbuh pada daerah *interdal* dan *supratidal* yang cukup mendapat aliran air, dan terlindungi dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Definisi lain diberikan oleh Soerianegara (1987) bahwa hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh pada tanah berlumpur alluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut dengan beberapa genera atau spesies yaitu *Avicennia* sp, *Sonnerati*sp, *Rhizophora*sp, *Bruguiera*sp, *Ceriop*ssp, *Lumnitzera* sp, *Excoecaria*sp, *Xylocarpus*sp, *Aegicvera* sp, *Scyphyphora*, dan *Nypa* sp.

Tomlinson (1986) dan Wightman (1989) mendefinisikan mangrove sebagai vegetasi yang terdapat di daerah pasang surut sebagai suatu komunitas. Hutan pasang surut atau hutan payau lebih dikenal dengan nama hutan mangrove merupakan vegetasi yang tumbuh dipengaruhi oleh kadar garam serta adanya aliran sungai yang berair tawar, sehingga pada umumnya hutan mangrove berada di muara-muara sungai di tepi pantai yang cukup terlindungi oleh hampasan gelombang dan angin laut yang deras (Darsidi, 1984).

2.1.1 Fungsi dan Manfaat Mangrove

Ekosistem mangrove merupakan suatu ekosistem peralihan antara lautan dan daratan yang menjadi mata rantai penting dalam pemeliharaan

keseimbangan siklus biologi perairan, tempat berlindung dan berpijah berbagai jenis udang, ikan, berbagai biota laut lainnya, dan juga habitat satwa sehingga secara ekologis dan ekonomis dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan manusia (Sugandhy, 1993). Menurut Kusmana (2003), fungsi hutan mangrove dibagi atas 3. (a) Fungsi fisik yang dapat melindungi lingkungan dari pengaruh oseanografi, mengendalikan abrasi, dan mencegah intrusi air laut ke darat. (b) Fungsi biologi sangat berkaitan dengan perikanan sebagai asuhan, daerah mencari makan, dan daerah pemijahan dari berbagai jenis ikan, udang dan penyuplai unsur hara utama di pantai. (c) Fungsi ekonomi sebagai sumber kayu, nunur kayu, bahan kertas, chips, dan arang.

Hutan mangrove memiliki keunikan tersendiri, baik dari jenis tumbuhan, biota yang ada serta sebagai habitat baik bagi aneka jenis hewan melata, jenis burung bahkan kera. Hal ini terjadi keran hutan mangrove memiliki sumber makanan dan cocok sebagai tempat berkembangbiaknya hewan dan biota tersebut. Jenis tumbuhannya pun sangat bermanfaat bagi manusia antara lain bisa digunakan sebagai bahan kayu bakar, bahan sabun dan plup bahkan buahnya dapat digunakan sebagai bahan baku makanan seperti kue, sirup dan slai yaitu buah mangrove jenis *bogem* (Pokmaswas Kejung Samudera, 2012).

2.1.2 Penyebab Kerusakan Mangrove

Kerusakan ekosistem mangrove umumnya disebabkan oleh dua faktor utama yaitu secara alami dan buatan manusia. Kerusakan alami seperti badai topan dapat merusak dan memporak-porandakan ekosistem mangrove, sedangkan kerusakan akibat campurtangan manusia erat kaitannya dengan konversi lahan mangrove menjadi tambak dan penebangan untuk pemanfaatan kayu dari hutan mangrove (Nybakken, 1988). Pola pertumbuhan mangrove termasuk struktur, fungsi, komposisi dan distribusi spesies yang berasosiasi

dengan ekosistem mangrove sangat tergantung pada faktor lingkungan (Kusmana, 2003).

Ekosistem mangrove secara terus menerus mendapat tekanan akibat berbagai aktivitas manusia seperti pembukaan lahan usaha pertambakan, pertanian/perkebunan serta bentuk pemukiman maka perlu dilakukan pelestarian jalur hijau pantai khususnya mangrove sebagai tempat pembentukan ekosistem hutan mangrove dan tempat berkembangbiakan biota laut seperti kepiting, udang, ikan beranekaragam jenis kerang dan biota laut lainnya (Pokmaswas Kejung Samudra, 2012).

2.1.3 Potensi Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove

Pemanfaatan ekosistem mangrove untuk kesejahteraan masyarakat memerlukan penilaian atau valuasi ekonomi secara detail. Oleh karena itu manfaat yang didapatkan dari ekosistem mangrove secara keseluruhan dapat diprediksi dan diestimasi untuk mengetahui besarnya manfaat yang diperoleh untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya yang menggantungkan hidup di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Manfaat ekonomi ekosistem mangrove seharusnya diketahui dan dipahami oleh para *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Karena itu, dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove mereka tetap mengacu pada aturan konservasi dan kebijakan pemanfaatan yang telah ditetapkan oleh lembaga eksekutif dan legeslatif. Salah satu elemen pendukung yang sangat penting dalam menentukan kebijakan atau aturan pemanfaatan ekosistem mangrove adalah penilaian atau valuasi ekonomi komponen dari ekosistem mangrove. Valuasi ekonomi dapat memberikan nilai tertentu berdasarkan asumsi-asumsi dan dianalisis untuk mengetahui besarnya biaya pengolahan dan mafaat yang diterima (Amran, 2014).

Menurut (Adrianto, 2006) Manfaat hutan mangrove secara ekonomis adalah untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun nilai nilai ekonomi dari setiap bentuk pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Manfaat kayu, pemanfaatan hasil hutan mangrove khususnya kayu umumnya digunakan untuk kayu bangunan, tiang atau patok patrit, pembuatan pintu air di tambak, pembuatan perahu atau sampan, dan kayu bakar. Namun kegiatan pengambilan kayu mangrove oleh masyarakat secara terbatas dengan memperhatikan kelestarian hutan mangrove.
- b. Manfaat arang, kegiatan pembuatan arang yang dilakukan masyarakat bersifat temporer, bergantung dari kondisi hutan mangrove. Apabila dijumpai pohon yang mati karena usia tua atau ranting pohon mangrove yang patah dan jatuh, kayu biasanya digunakan untuk pembuatan arang.
- c. Manfaat bibit mangrove, pengambilan atau pembuatan bibit mangrove secara buatan di peroleh dari mangrove jenis *Rhizophora* sp, *Brugueira* sp, dan *Avecennia* sp yang diperkirakan sudah matang.
- d. Manfaat burung, salah satu komponen ekosistem mangrove yang hidup berasosiasi dengan mangrove di bagian batang dan daun mangrove adalah burung. Kondisi ini menraki perhatian stakeholder s sehingga menimbulkan keinginan untuk menangkap dan memiliki jenis burung tertentu. Kisaran harga burung yang biasa dijual oleh nelayan adalah Rp 5.000-Rp 15.000 per ekor.
- e. Manfaat ikan, kepiting, udang dan kerang-kerangan. Sebagian besar nelayan mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini. Daerah penangkapan

biasanya berada di sekitar hutan mangrove dengan menggunakan alat tangkap seperti pancing, jaring dan parit.

2.2 Jaminan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Jaminan sosial dapat didefinisikan sebagai sistem pemberian uang dan atau pelayanan sosial guna melindungi seseorang dari resiko tidak memiliki atau kehilangan pendapatan akibat kecelakaan, kecacatan, sakit, menganggur, kehamilan, masa tua dan kematian. Menurut Spcker (1995: 60) istilah jaminan sosial berhubungan dengan bantuan keuangan, tetapi pengertian umum dari istilah ini lebih luas dan masih digunakan di banyak Negara untuk perawatan kesehatan serta pendapatan.

Menurut Kenneth Thomson (1980) Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.

2.3 Jaminan Sosial Sumberdaya Alam

Menurut Benda-Beckman (2001), sumberdaya alam merupakan jaminan sosial bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Agar jaminan sosial masyarakat

tetap terjamin, maka diperlukan suatu pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Persoalan pengelolaan sumberdaya alam dan tentang bagaimana usaha menjamin kelangsungan hidup dapat dicapai dengan mencakup spectrum yang luas, yaitu meliputi persoalan hutan, air, tanah, laut, berbagai institusi dan praktir sosial dalam berbagai bentuknya yang memperlihatkan suatu mekanisme jaminan sosial yang hidup dan berfungsi dalam suatu masyarakat. Untuk itu sejumlah refleksi dapat diangkat sebagai bahan renungan dalam mengkontekstualisasikan persoalan jaminan sosial di Indonesia.

1. Menyangkut masalah status warga Negara yang memiliki pengertian tentang pengakuan hokum dan politik atas keberadaan penduduk yang termanifestasi dalam suatu system perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Jika status hukum penduduk mendapatkan artikulasi politik yang tepat, maka gerakan sipil yang berfungsi melakukan kendali dan penyeimbangan dalam suatu hubungan kekuasaan Negara dan rakyat, maka hak-hak rakyat akan mendapatkan pengakuan secara lebih baik
2. Menyangkut isu hak dan pemilikan atas suatu sumberdaya alam dan barang publik, yang terkait dengan persoalan hubungan kekuasaan. Hak dan pemilikan di kalangan orang kecil merupakan suatu persoalan yang rentan, karenakelompok yang lemah itu dapat dengan mudah kehilangan hak atas sumberdaya yang dimilikinya akibat suatu proses sosial politik yang tidak mampu mereka kendalikan.
3. Persoalan jaminan sosial menyangkut masalah akses dan kontrol, yang menentukan keadaan terjamin tidaknya hak publik atas suatu sumberdaya yang tersedia. Mekanisme jaminan sosial dalam hal ini, harus disediakan oleh berbagai agen sosial untuk dapat mencapai berbagai kelompok dan kategori penduduk yang membutuhkan bantuan. Mengingat persoalan ketimpangan

akses ini jauh lebih rumit karena menyangkut berbagai kategori kelompok, seperti agama, etnis dan lokalitas.

4. Menyangkut kategori kelompok yang diuntungkan dan dirugikan dalam berbagai hal. Penyelesaian suatu persoalan, seperti sengketa pemakaian sumberdaya alam apakah benar-benar menguntungkan pihak yang memiliki hak atas sumberdaya itu.

Menurut (Charles, 2001) Konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan sendiri harus mengandung aspek :

1. *Ecological sustainability* (berkelanjutan ekologi). Dalam pandangan ini memelihara keberlanjutan stok/biomass sehingga tidak melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas dari ekosistem menjadi konsekuensi utama.
2. *Socioeconomic sustainability* (keberlanjutan sosio-ekonomi). Konsep ini mengandung makna bahwa pembangunan perikanan harus memperhatikan keberlanjutan dari kesejahteraan pelaku perikanan pada tingkat individu. Dengan kata lain mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi merupakan konsekuensi dalam kerangka keberlanjutan ini.
3. *Community sustainability*, mengandung makna bahwa keberlanjutan dari sisi komunitas atau masyarakat haruslah menjadi perhatian membangun perikanan berkelanjutan.
4. *Institutional sustainability* (keberlanjutan kelembagaan). Dalam kerangka ini keberlanjutan yang menyangkut pemeliharaan aspek finansial dan administrasi yang sehat merupakan prasyarat dari ketiga pembangunan keberlanjutan di atas.

Dengan demikian, pengelolaan perikanan berkelanjutan bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan kelestarian sumberdaya itu sendiri atau

keuntungan ekonomi, akan tetapi lebih dari itu adalah untuk keberlanjutan komunitas masyarakat (community sustainability) yang ditunjang oleh keberadaan institusi yang mencakup kualitas keberlanjutan dari perangkat regulasi, kebijakan dan organisasi untuk mendukung tercapainya keberlanjutan ekologi, ekonomi dan komunitas. Aspek-aspek pengelolaan perikanan sangat dinamis, hal ini sesuai dengan tujuan dan kondisi suatu wilayah.

Gobyah (2003), mengatakan bahwa kearifan lokal (lokal genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun nilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal.

Kearifan penting dimanfaatkan mengingat secara global kondisi perikanan dunia sebagaimana besar dieksploitasi berlebih (Sulaiman, 2010). Kondisi yang sama terjadi di Aceh, baik pesisir barat – selatan maupun timur – utara sudah dalam kondisi di luar potensi lestari (T. Muttaqin, 2010).

2.4 Berbagai Adat Yang Melindungi Sumberdaya

Masyarakat memiliki adat istiadat, nilai-nilai sosial maupun kebiasaan yang berbeda dari berbagai tempat. Hal ini menyebabkan perbedaan pula dalam pemanfaatan sumberdaya. Proses pengelolaan dilaksanakan dengan cara memperhatikan kondisi masyarakat dan kebudayaan serta unsur-unsur fisik masing – masing wilayah. Yang perlu diperhatikan adalah nilai dan norma yang dianut masyarakat yang merupakan kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Sebagai contoh di Indonesia antara lain : Sasi

Laut di Maluku, Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam dan Tradisi Awig-Awig Di Nusa Penida Bali.

2.4.1 Sasi Laut di Maluku

Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku sudah dilaksanakan sejak dulu. Hal ini akan dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan. Kegiatan larangan pengambilan hasil-hasil potensi ini oleh masyarakat Maluku dikenal dengan sebutan "SASI". Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Bila sasi dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah desa (Frank L. Cooley, 1987).

Sasi menurut Kizya dalam Judge dan Nurizka (2008), dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi pada hakekatnya juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh raga/penduduk.

Menurut Zulfikar (2008) Sasi adalah tradisi masyarakat yang memiliki nilai hukum yang substansi yaitu merupakan larangan sementara untuk tidak mengambil hasil hutan maupun hasil laut sampai pada waktu tertentu. Sasi dapat dikatakan memiliki nilai hukum, sebab memiliki norma atau aturan yang

berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat yang didalamnya memuat unsur etika dan norma. Nilai-nilai hukum yang substansial dalam sistem sasi sebagai inti dari hukum adat tersebut sebagai berikut :

- a. Penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan.
- b. Mencegah timbulnya sengketa antara sesama penduduk negeri
- c. Pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan (laut/darat) demi peningkatan kesejahteraan bersama
- d. Kewajiban untuk memanjakan hasil laut dan darat
- e. Mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan yang dibuat berupa pencurian

2.4.2 Panglima Laut Nanggroe Aceh Darussalam

Aceh memiliki pola kelembagaan yang menempatkan panglima laot sebagai institusi dalam ketentuan/aturan yang lebih luas. Panglima laot menetapkan batas-batas ketentuan adat mengenai sistem pengelolaan sumberdaya laut dan masalah-masalah pelaksanaan sosial dalam suatu ketetapan adat (Andri, 2008). Panglima laot adalah penguasa lingkungan laut di dalam persekutuan hukum adat laut pada masyarakat pesisir Nanggroe Aceh Darussalam. Kelembagaan ini di lingkungan masyarakat nelayan Banda Aceh mempunyai hukum, daerah, warga, kekayaan dan kekuasaan yang relatif bersifat otonom. Dalam tradisi masyarakat nelayan, peran kelembagaan Panglima Laot adalah mengkoordinasikan satu atau lebih daerah perikanan, minimal satu perkampungan nelayan, dengan tugas-tugas meliputi :

1. Mengawasi dan memelihara pelaksanaan hukum adat laut.
2. Mengatur tata cara penangkapan ikan

3. Menyelesaikan berbagai pertikaian yang terjadi dalam hubungannya dengan penangkapan ikan di laut
4. Menyelenggarakan upacara adat laut, kecelakaan di laut dan gotong royong dan masalah sosial lainnya (Hidayat, 2013).

Sejak tahun 1972 lembaga adat Panglima Laot mulai diatur oleh pemerintah daerah melalui dinas perikanan setempat, dengan melakukan penertiban dan pencatatan hukum adat laut yang berkembang dalam masyarakat nelayan. Bahkan, secara yuridis formal kedudukan Panglima Laut telah diatur dalam Perda Propinsi Daerah Istimewa Aceh (NAD) No 2. Tahun 1990 Perda tersebut menjadi dasar legitimasi formal hak ulayat laut dan kearifan lokal masyarakat nelayan Banda Aceh yang telah berlangsung berabad-abad.

Menurut Sulaiman (2013), dalam pelaksanaan Rencana Strategis Panglima Laot se-Aceh yang dilaksanakan Panglima Laot Aceh pada 9-12 Desember 2006 di Banda Aceh, seluruh fungsi dan peran yang menjadi tanggung jawab Panglima Laot juga dibahas secara detail. Ada beberapa bahasan spesifikasi program, yang mencakup : (a) penguatan masyarakat nelayan, (b) penguatan hukum adat laot masyarakat nelayan, (c) pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan, (d) program beasiswa untuk pelajar dari kalangan nelayan miskin, dan (e) memelihara lingkungan dari kerusakan. Jadi jelas, pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, secara khusus dibahas oleh Panglima Laot sebagai sesuatu yang sangat penting dalam konteks memelihara lingkungan dari kerusakan dan eksploitasi berlebihan demi kesinambungan dan berkelanjutan. Agar hukum adat laut berjalan sebagaimana yang diharapkan, dalam aturan juga disusun sebuah bab khusus yang mengatur tentang sanksi hukum bagi yang melanggar, dimana akan berhadapan dengan dua kemungkinan : (a) seluruh hasil tangkapan akan disita; (b) dilarang melaut selama 3-7 hari.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Panglima Laot dalam pengelolaan Sumber Daya Alam laut di Kota Sabang (Andri, 2008) :

1. Faktor cara penangkapan ikan di laut

Menurut Kabag Umum Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Sabng, Abi Roib bahwa metode penangkapan ikan pada setiap Lhok (satuan lokasi tempat nelayan berdomisili) berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari persoalan-persoalan penangkapan ikan yaitu persoalan ini diawali dari suatu perbedaan pandangan yang sebenarnya sama-sama baik dua wilayah hukum adat seakan telah menjadi dua kubu saling yang saling bertentangan wilayah.

2. Faktor Kelembagaan

Secara kelembagaan lembaga Panglima Laot merupakan lembaga yang sudah sangat tua usianya, dari dulu hingga sekarang lembaga tersebut tetap eksis dan belum pernah tercatat bahwa lembaga Panglima Laot tersebut mati atau dimatikan oleh pemerintah, namun walupun demikian pada saat ini Lembaga Pasnglima Laot sudah muali sangat rapuh, hal ini diakibatkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Kewenangan-kewenangan Panglima Laot di era saat ini sudah berubah dari penguasa wilayah perikanan menjadi pengelola wilayah perikanan dalam hubungan koordinatif dengan Pemerintah sebagai penguasa di daerah.
- b. Dalam hal pembuatan kebijakan lembaga adat termasuk Panglima Laot jarang sekali diikuti sertakan sehingga kebijakan-kebijakan tersebut justru terkadang tidak berpihak kepada lembaga adat.
- c. Struktur kepengurusan Panglima Laot semakin tidak teratur hal ini diakibatkan dari tidak ada aturan yang jelas tentang pengaturan secara kelembagaan.

- d. Tidak adanya pemberian suatu pendidikan dan pelatihan dalam hal manajemen organisasi
 - e. Tidak adanya kantor panglima laot
3. Faktor pendapatan lembaga
- a. Tidak adanya anggaran keuangan untuk menjalankan roda organisasi adat tersebut sehingga kebanyakan justru biaya organisasi ditanggung oleh para pengurus
 - b. Tidak adanya pemasukan kepada kas lembaga adat dari kegiatan-kegiatan perikanan
 - c. Tidak adanya sarana dan prasarana yang dapat mendukung perkembangan organisasi adat panglima laot
 - d. Tidak adanya insentif yang memadai bagi para pemangku adat laot.
4. Faktor-faktor batas wilayah

Berdasarkan Peraturan tentang pokok-pokok pelaksanaan kehidupan adat Laot disebutkan bahwa batasan-batas di darat sehingga pada saat sedang melakukan pelayaran di laut maka sangat sulit untuk menentukan apakah perairan yang dilalui termasuk kepada wilayah hukum yang mana ketika pelayaran tersebut berada dalam wilayah hukum yang berbatasan.

5. Faktor Sumber Daya Manusia

Manusia seringkali menjadi faktor kerusakan lingkungan, yaitu dengan melakukan penangkapan ikan yang salah, penebangan hutan, pembuangan sampah secara sembarangan yang mengakibatkan banjir dan kurangnya pengetahuan mengenai manfaat sumberdaya alam.

2.4.3 Tradisi Awig-Awig Di Nusa Penida Bali

Secara historis nama Nusa Penida berasal dari istilah Manusa Pandita. Manusa adlaah seseorang yang bernama Jumpungan dan Dukuh adalah seorang

Pandita. Kalimat Manusa Pandita inilah lama kelamaan berubah menjadi Nusa Penida. Asal mula istilah ini berdasarkan Babad Nusa Penida, dimulai pada tahun saka 50 di sebuah gunung yang bernama Gunung Mundhi (kutipan dari Babad Nusa Penida, 2007).

Kusmanto (2004) menjelaskan bahwa aturan pengelolaan sumberdaya perikanan pantai yang ada di Nusa Penida, Propinsi Bali disebut dengan awig-awig. Awig-awig tersebut merupakan aturan turun temurun yang tertulis dalam tulisan Kawi atau Jawa Kuno pada daun lontar, kemudian diterjemahkan ke dalam tulisan latin dengan menggunakan Bahasa Bali pada Tahun 1982 menjadi 8 bab dan 92 pasal.

Adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat Nusa Penida memiliki nilai budaya, system norma, dan kebiasaan yang dihormati dan disepakati oleh setiap warga baik tertulis berupa awig-awig ataupun yang tidak tertulis seperti Masyarakat Bali pada umumnya. Upacara keagamaan yang berhubungan dengan kehidupan laut yang dilakukan Masyarakat Nusa Penida meliputi Upacara Melasti, Ngayut, Mulang Pekelem, Banyu Pinaruh, Ngangkid, Melukat dan lain-lain.

Peraturan pemanfaatan dan pengelolaan pantai yang saat ini berlaku di Jungut Batu merupakan implementasi dari peraturan formal, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Isi dari aturan yang menyangkut pengelolaan sumberdaya perikanan pantai ditetapkan oleh pemerintah desa, perangkat adat, dan tokoh-tokoh agama atau adat sebagai berikut :

1. Masyarakat Adat Desa Jungut Batu dilarang mengambil dan memanfaatkan kayu bakau untuk kepentingan apapun

2. Masyarakat Adat Desa Jungut Batu tidak diperkenankan mengambil batu karang kerana dapat merusak ekosistem yang menyebabkan abrasi pantai dan merusak keindahan
3. Untuk kebutuhan pembangunan rumah tinggal, pengambilan pasir pantai dialokasikan di daerah tertentu di desa adat dengan sepengetahuan kepala adat.

2.5 Pengelolaan Sumberdaya Mangrove

Pelestarian hutan mangrove merupakan suatu usaha yang sangat kompleks untuk dilaksanakan, karena kegiatan tersebut sangat membutuhkan sikap akomodatif terhadap segenap pihak baik yang berada di sekitar kawasan maupun di luar kawasan. Pada dasarnya kegiatan ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari berbagai kepentingan. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan adalah menjadikan masyarakat sebagai komponen utama penggerak pelestarian hutan mangrove. Dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove, terdapat beberapa konsep yang dapat diterapkan, antara lain :

- (1) Perlindungan dan pelestarian ekosistem mangrove dengan menunjuk suatu kawasan ekosistem mangrove untuk menjadi kawasan hutan moratorium dan sebagai suatu bentuk sabuk hijau di sepanjang pantai.
- (2) Rehabilitasi ekosistem mangrove, dengan melakukan penghijauan terhadap bagian yang rusak sehingga dapat mengembalikan nilai estetika dan nilai fungsi ekologis kawasan hutan mangrove yang telah rusak. (Joshian, 2011).

Perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem mangrove yang tidak didasari adanya data, informasi, dan perencanaan yang baik, berpengaruh terhadap potensi ekosistem mangrove. Akibatnya terjadi degradasi dan penurunan kualitas lingkungan (ekosistem mangrove). Menurut

Rokhimin Dahuri (2002) permasalahan utama tentang pengaruh atau tekanan terhadap habitat mangrove bersumber dari keinginan manusia untuk mengkonservasi areal hutan mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan-kegiatan komersial, industri dan pertanian. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan mangrove secara rasional bagi pertanian, pertambakan atau kepentingan lain hendaknya mencakup usur-usur berikut:

- (1) Selektif dalam hal komoditas yang akan dikembangkan sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan pertanian.
- (2) Preservasi yang harus dilaksanakan andaikan pembukaan lahan mangrove akan berakibat menghilangkan fungsi fisiknya. Kawasan mangrove dengan tebal jalur hijau tipis seperti terdapat di Jawa. Bali, NTI, NTB termasuk yang dianjurkan untuk dipreservasikan.
- (3) Konservasi, pembukaan lahan mangrove untuk berbagai kepentingan harus disertai dengan usaha untuk menyisihkan sebagian dari lahan mangrove sebagai jalur hijau. Kegiatan konservasi ini dapat dilaksanakan di wilayah mangrove dengan tebal jalur hijau lebar atau sedang seperti di Irian Jaya. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. dan Sumatra Bagian Timur. (Ahyar, 2011).

2.6 Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Siswanto (2001), mengatakan bahwa secara empirik banyak studi menunjukkan bahwa masyarakat lebih mampu mengidentifikasi, menilai dan memformulasikan permasalahannya, baik fisik, sosial kultural maupun ekonomi dan kesehatan lingkungan, membangun visi dan aspirasi dan kemudian memprioritaskan, intervensi, merencanakan, mengelola, memonitor dan bahkan memilih teknologi yang tepat.

Masyarakat juga dapat memainkan peranan yang sesuai dengan kondisi fisik wilayahh serta ketersediaan sumberdaya yang ada dengan batasan-batasan yang lebih mereka kenal, sehingga pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat lokal tetap dapat dipakai dalam waktu yang relative lebih lama dengan meminimalisir dampak yang akan muncul kemudian hari.

Pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat sebenarnya telah ditetapkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan Negara atas sumberdaya alam khususnya sumberdaya pesisir dan lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak, dan juga harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir serta memajukan desa-desa pantai.

2.7 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Maroeto (1999) yang berjudul pola penataan ruang dalam usaha-usaha konservasi pada wilayah hutan mangrove di daerah Teluk Prigi, Trenggalek. Kawasan Pancer Cengkrong adalah sebuah muara yang terdapat di Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Wilayah pasang surut sekitar 2 km
2. Dapat dibagi secara abstrak menjadi 4 wilayah estuarine, yang didasarkan pada salinitas air rata-rata.
3. Mempunyai bentuk sungai tidak terlalu berliku-liku
4. Diapit daratan yang mempunyai kemiringan cukup tajam

2. Slop dasar sungai yang cukup landai
3. Dibatasi hutan pegunungan

Karakteristik di atas menjelaskan pancer cengkong mempunyai diversitas vegetasi yang sangat bervariasi baik vegetasi mangrove maupun vegetasi gunung. Pancer Cengkong merupakan kawasan yang ideal untuk hutan mangrove.

Namun demikian semua itu akan berubah total apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dimana sementara ini telah ditemukan gejalanya yaitu :

1. Terjadi penebangan pohon bakau secara liar dan tidak mengikuti konsep tebang pilih
2. Terjadi erosi pada bagian hulu sungai, yang akan merubah komposisi tanah dasar dan pada gilirannya akan terjadi perubahan habitat mangrove

Dilihat dari segi perencanaan upaya pengelolaan hutan mangrove di pesisir Karanggandu sudah berhasil, hal ini terbukti bahwa setiap tahapan perencanaan yang telah dilakukan pemerintah dengan masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Sebagai wujud keberhasilan tersebut telah ditetapkan kesepakatan lokal yang tertulis dalam bentuk draft peraturan desa dimana dalam pelaksanaannya harus dipatuhi oleh warga setempat. Upaya pemanfaat terhadap pengelolaan hutan mangrove yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek melalui pembinaan dan pendampingan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir juga sudah dikatakan berhasil. Hal ini terbukti pemerintah telah mengembangkan budidaya kerang mutiara di Pantai Damas serta membudidayakan udang galah Desa Tasikmadu. Secara tidak langsung pemerintah telah membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat setempat.

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek bersama dengan

masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap lingkungan yang cukup besar. Hal ini terbukti bahwa tingkat populasi beberapa jenis ikan disekitar mangrove mengalami peningkatan. Namun, Upaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat belum efektif, hal ini disebabkan karena kurangnya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan hutan mangrove di pesisir Desa Karanggandu, terbatasnya jumlah aparata pengawas, serta kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pengawasan. Sebagai akibat dari ketidakefektifan upaya pengawasan dan pengendalian tersebut menyebabkan timbulkan berbagai tindakan pengerusakan kawasan mangrove, yang diantaranya adalah penebangan kayu mangrove sebagai kayu bakar, serta pengalihfungsian kawasan mangrove menjadi lahan perkebunan kelapa, tempat penambatan perahu dan pertanian oleh sebagian masyarakat. Tanpa disadari tindakan tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan kelestarian mangrove sebagai tanaman penyangga dan pelindung pantai.

Menurut Susilo (2007), dalam risetnya tentang dinamika kelembagaan lokal pengelola sumberdaya perikanan kawasan pesisir, menyimpulkan: pertama, salah satu komponen ketahanan pangan adalah adanya kecukupan ketersediaan sumberdaya pangan. Kedua, kepemilikan sebuah kedaulatan pangan suatu masyarakat memberi bahwa masyarakat tersebut memiliki jaminan sosial atas sumberdaya. Ketiga, salah satu kata kunci jaminan sosial masyarakat mampu berada dalam ketahanan pangan domestik adalah pada adanya sebuah kelembagaan yang menjadi media bagi proses tersebut. Keempat, sejarah perjalanan tokoh kunci dalam kelembagaan di pedesaan, tidak terlepas dari persoalan-persoalan politik dan konflik di dalam memperebutkan sumberdaya maupun pengaruh terhadap pelaksana lapang. Kelima, proses kerusakan

sumberdaya dapat dicegah, karena dari data yang ada menunjukkan bahwa kerusakan itu dominan disebabkan oleh kegiatan manusia. Keenam, analisis substansi hukum menunjukkan adanya tumpang tindih dalam pengelolaan sumberdaya perikanan pesisir. Ketujuh, bangkitnya pengelolaan hutan berbasis pada masyarakat yang saat ini di Karanggandu dipelopori oleh Lembaga Musyawarah Desa Hutan (LMDH) "Argo Lestari", yang berusaha membawa perubahan pada pengelolaan sistem "Gopla" ke arah yang lebih lestari dan ekonomis memiliki dua mata pisau terhadap pengelolaan hutan mangrove. Kedelapan, kompleksitas kelembagaan sumberdaya perikanan pesisir saat ini akan mempengaruhi pada kinerja kelembagaan.

Yunalinda (2010) berdasarkan penelitiannya yang berjudul jaminan sosial sumberdaya perikanan di Pantai Damas, Trenggalek menyimpulkan jaminan sosial masyarakat Damas berupa berbagai aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya alam dari sumberdaya perikanan yang ada disekitarnya, sebagai nelayan, pencari ikan dan kepiting di areal bakau, bertani dan beternak. Masyarakat Damas melakukan kegiatan pengelolaan sumberdaya dengan menerapkan kearifan lokal serta pembentukan kelembagaan lokal. Pemerintah memberikan bantuan fisik dan non fisik untuk tetap menjaga jaminan sosial yang ada di Pantai Cengkong kawasan hutan mangrove. Bantuan fisik berupa pemberian bantuan rehabilitasi mangrove di Pancer Ngumprukkan dan Pancer Bang, bantuan benih, pakan dan bantuan alat tangkap untuk nelayan. Bantuan non fisik berupa pembinaan, pembentukan dan penguatan pada kelompok alat tangkap Udang Jaya, diundangkannya Peraturan Daerah No 10 tahun 2004 dan ditetapkannya kawasan mangrove, terumbu karang dan bidang penangkapan.

2.8 Kerangka Bepikir

Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan yang melimpah, salah satunya adalah sumberdaya mangrove. Untuk itu diperlukan pengelolaan mangrove berkelanjutan mengingat banyak sekali manfaat yang diperoleh dari mangrove. Menurut (Charle, 2001) Konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan mengandung aspek :

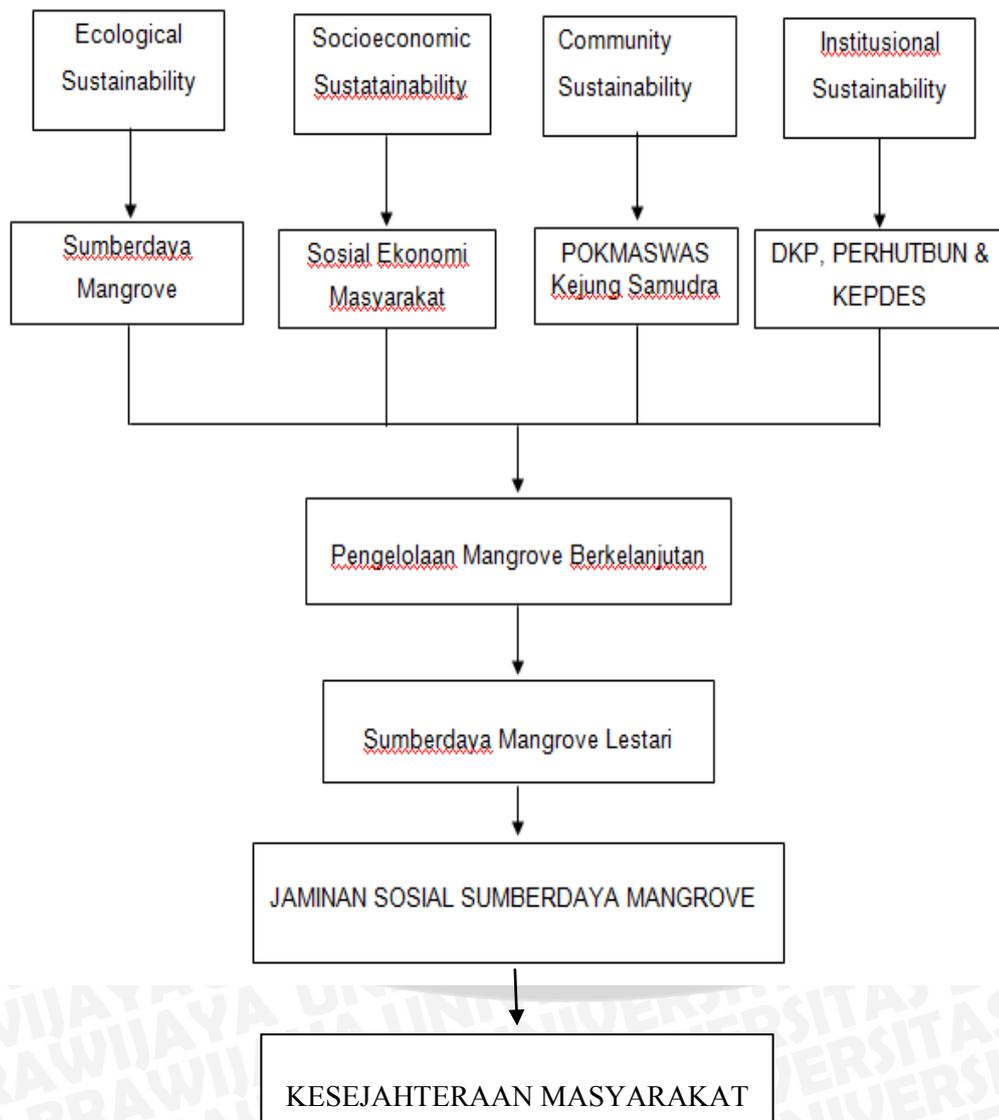
1. *Ecological sustainability* (keberlanjutan ekologi)
2. *Socioeconomic sustainability* (keberlanjutan sosio-ekonomi)
3. *Community sustainability*
4. *Institutional sustainability* (keberlanjutan kelembagaan)

Dengan demikian, pengelolaan perikanan berkelanjutan bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan kelestarian sumberdaya itu sendiri atau keuntungan ekonomi, akan tetapi lebih dari itu adalah untuk keberlanjutan komunitas masyarakat (*community sustainability*) yang ditunjang oleh keberadaan institusi yang mencangkup kualitas keberlanjutan dari perangkat regulasi, kebijakan dan organisasi untuk mendukung tercapainya keberlanjutan ekologi, ekonomi dan komunitas. Aspek-aspek pengelolaan perikanan sangat dinamis. Hal ini sesuai dengan tujuan dan kondisi suatu wilayah.

Jaminan sosial menurut Benda-Beckam (1994) adalah upaya-upaya individu, kelompok sosial, atau organisasi untuk menanggulangi ketidakpastian yang menyangkut eksistensi mereka, yaitu yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan air dan makanan, tempat perlindungan, pemeliharaan dan kesehatan fisik mental, serta pendapatan dan pendidikan. Jadi sumberdaya alam merupakan jaminan sosial bagi masyarakat yang ada disekitarnya. Agar jaminan sosial masyarakat terhadap sumberdaya mangrove tetap terjamin, maka diperlukan suatu pengelolaan sumberdaya alam perikanan secara berkelanjutan.

Dengan adanya pengelolaan yang baik terhadap sumberdaya mangrove diharapkan dapat memberikan banyak manfaat khususnya bagi masyarakat Desa Karanggandu agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mensejahterakan hidup mereka. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, antara masyarakat, pemerintah dan stakeholders harus bekerjasama dalam pengelolaan dan pengawasan hutan mangrove.

Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada alur kerangka pemikiran seperti pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 18 Mei -12 Juni 2015. Lokasi penelitian yaitu di kawasan sumberdaya Mangrove Pancer Cengkong, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.



Gambar 2. Peta lokasi penelitian

3.2 Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan satuan pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove di Desa Karanggandu. Jenis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemeliharaan ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang (Nasr, 1998). Menurut Sugiyono (2005), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang terperinci tentang latar belakang, sifat-sifat serta

karakter-karakter yang jelas dari kasus ataupun individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas yang akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti subjek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup keseharian.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif, lebih mengandalkan manusia (peneliti) sebagai instrument utama dan berinteraksi dengan orang yang diamati dalam suatu cakupan yaitu pada masyarakat kawasan hutan mangrove, Kepala Desa, pegawai DKP Trenggalek, serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini guna menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata atau lisan yang diperoleh dengan melakukan wawancara, serta kegiatan lainnya yang dapat menunjang seperti observasi dan dokumentasi.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Pengertian data primer menurut Umi Narimawati (2008) adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan narasumber/informan secara langsung dari ketua dan anggota Pokmaswas Kejung Samudra, kasi konservasi dan pengawasan DKP Trenggalek, dan ketua bagian kehutanan Dinas PERHUTBUN Trenggalek.

3.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2008). Data sekunder ini

merupakan data yang mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam pengumpulannya data sekunder ini diperoleh dari instansi yang terkait seperti Kantor Kepala Desa Karanggandu untuk mengetahui letak desa, batas desa, mengetahui jumlah penduduk, potensi desa, dan beberapa data lainnya dari perpustakaan untuk mencari sumber beberapa literatur buku dan jurnal. Selain itu juga data-data tertulis dari DKP, PERHUTBUN dan kelompok masyarakat pengawas.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Menurut Sanafiah Faisal (1990) dalam Sugiyono (2014), mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation* dan *covert observation*) dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*). Sedangkan menurut Marshal (1995) dalam Sugiyono (2014), menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar mengenai perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Pada penelitian kali ini, observasi dilakukan dengan melihat kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove di desa Karanggandu. Observasi dalam penelitian ini bertujuan memperoleh informasi mengenai sistem pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang meliputi beberapa aspek:

- Mengamati sekitar lingkungan dan tata letak lokasi
- Mempelajari dan mengetahuiseperti apa proses pembibitan, penanaman dan pemanfaatan mangrove.

- Terlibat dalam proses pengelolaan mangrove mulai dari proses pembibitan, penanaman dan pemanfaatan mangrove.
- Mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan hutan mangrove.
- Mengetahui peran masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

3.4.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti iakan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti menghendaki untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2014).

Sedangkan menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2014), mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang beratap muka untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan 2 pihak, yaitu narasumber dan pewawancara. Kelompok Masyarakat Pengawas Kejung Samudera, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek dan ketua bagian kehutanan Dinas PERHUTBUN Trenggalek.

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi kegiatan wawancara yang dilakukan mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove, peran pemerintah dalam pengelolaan dan peran masyarakat.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari

penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi dari peneliti.

3.5 Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,1988).

Menurut Nazir (1998), studi kepustakaan langkah yang penting dimana seorang peneliti setelah menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, literatur dari internet, laporan tahunan DKP, Profil Pokmaswas Kejung Samudera

3.6 Metode Pengambilan Sampel

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi. Tetapi situasi sosial yang terdiri tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. (Sugiyono, 2014). Menurut Kusuma (2010), sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian (sampel sendiri secara harfiah berarti contoh). Alasan perlunya pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.
- b. Lebih cepat dan lebih mudah.
- c. Memberi informasi yang lebih banyak dan dalam.
- d. Dapat ditangani lebih teliti

Dengan memperhatikan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memperoleh sampel yang representatif, penelitian ini dimulai dengan mengenal keseragaman dan ciri-ciri khusus populasi. Penelitian ini menggunakan teknik sampel *non probability sampling*. Dimana *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur/anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono,2014).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*, dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Ditunjukkan oleh orang yang mengenal betul tentang situasi sosial yang akan diteliti. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi (Sugiyono,2014).

Sehingga untuk mendapatkan data yang diperlukan menggunakan *purposive sampling* dibutuhkan responden yang mengetahui keadaan di kawasan hutan mangrove Pancer Cengkong. Adapun sampel pada penelitian ini adalah:

1. POKMASWAS Kejung Samudra : Ketua (Imam Syaifudin, ketua 2 (Asrory), Anggota (Sugianto)
2. DKP : Suhartini (kepala seksi konservasi dan pengawasan, pengelolaan pulau pulau kecil) dan Agus Subechi (staf bidang pengelolaan sumberdaya kelautan)
3. PERHUTBUN : Titis Wardoyo (Ketua bagian kehutanan)

3.7 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014), Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapang, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sedangkan, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014).

Untuk menjawab dari tujuan-tujuan penelitian maka diperlukan tahapan analisis data dari masing-masing tujuan. Analisis data deskriptif kualitatif pada penelitian ini meliputi:

1. Aktifitas-aktifitas ekonomi dalam kehidupan masyarakatPancer Cengkongsebagai jaminan sosial sumberdaya mangrove

Data atau keterangan mengenai jaminan sosial sumberdaya mangrove tersebut diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Karanggandu. Mata pencaharian apa sajakah yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan sumberdaya mangrove dan berapa pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan mangrove.

2. Peran pemerintah terhadap keberlanjutan sumberdaya mangrove di Pancer Cengkong

Data atau keterangan mengenai peran pemerintah terhadap keberlanjutan sumberdaya mangrove melalui hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat. Selain itu dari bukti dokumentasi yang dimiliki oleh pihak terkait. Dalam hal ini pemerintah yang dimaksud yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, Dinas Kelautan dan Perikanan Trenggalek dan PERHUTBUN. Apa dan bagaimana peran pemerintah terhadap keberlanjutan sumberdaya mangrove, adakah bantuan berupa program atau keputusan atau

perundang-undangan yang berkaitan dengan sumberdaya mangrove, dan apa sajakah respon masyarakat terhadap tindakan pemerintah tersebut.

3. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan Jaminan Sosial sumber daya mangrove dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian rumah tangga.

Data atau keterangan mengenai upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan jaminan sosial sumberdaya mangrove yang telah ada dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian rumah tangga diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat. Bagaimana masyarakat mengawasi dan mengelola hutan mangrove.



IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

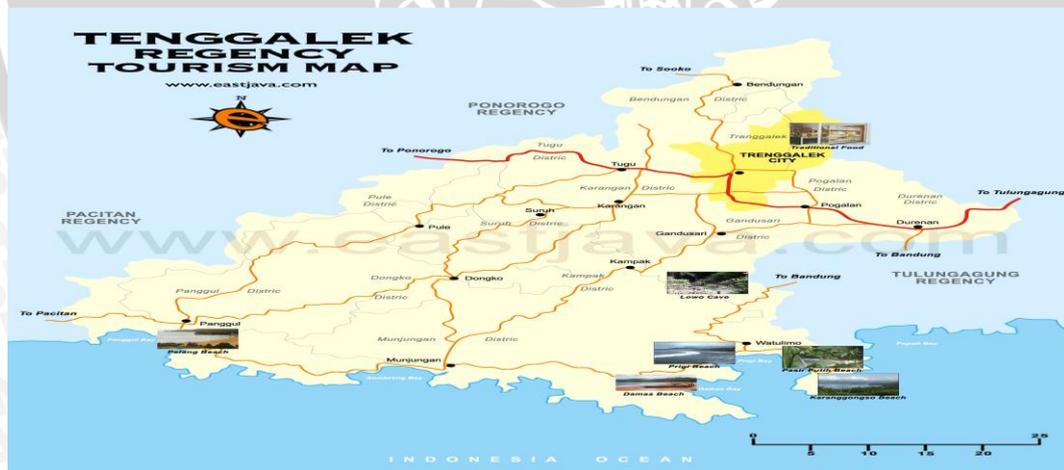
4.1 Letak Geografi dan Topografi Desa Karanggandu

Lokasi hutan mangrove di Desa Karanggandu memiliki jarak ke ibukota kecamatan Watulimo yaitu 4 km dengan waktu tempuh 15 menit dan jarak ke ibukota kabupaten Trenggalek adalah 55 km dengan waktu tempuh 1.5 jam.

Secara administrasi Desa Karanggandu memiliki batasan wilayah sebagai berikut

- Sebelah Utara : Desa Margomulyo
- Sebelah Timur : Desa Tasikmadu
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Kecamatan Munjungan

Desa Karanggandu memiliki luas 5.195 ha, terdiri dari dataran dengan luas 960 ha dan perbukitan dengan luas 4.000 ha. Ketinggian Desa Karanggandu berkisar antara 4 sampai 335 m di atas permukaan laut dengan topografi dataran hingga perbukitan dengan curah hujan 574mm/tahun.



Gambar 3. Peta Kabupaten Trenggalek

4.2 Keadaan Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Desa Karanggandu tahun 2014, total penduduk Desa Karanggandu sejumlah 6.664 jiwa yang terdiri dari 3.328 laki-laki

dan 3.336 perempuan dengan rasio 49,93 % : 50.06%. Kepala Keluarga (KK) berjumlah 2.394 jiwa. Komposisi penduduk meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan dan mata pencaharian/pekerjaan.

4.2.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan data kependudukan Desa Karanggandu tahun 2014, total penduduk Desa Karanggandu sejumlah 6.664 jiwa dengan klasifikasi laki-laki sejumlah 3.328 jiwa dan perempuan sejumlah 3.336 jiwa. Komposisi jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Karanggandu berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	3.328	49.93
2	Perempuan	3.336	50.06
	Jumlah	6.664	100

Sumber : Laporan Tahunan Desa Karanggandu Tahun 2014

4.2.2 Berdasarkan Usia

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Karanggandu berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	0-12 bulan	50	8
2	1-5 tahun	277	4
3	6-7 tahun	127	2
4	8-15 tahun	558	8
5	16-18 tahun	247	4
6	19-44 tahun	2.557	39
7	>44 tahun	2.847	48
	Jumlah	6.664	100

Pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jumlah usia produktif penduduk Desa Karanggandu pada tahun 2014 lebih banyak dari pada usia belum produktif dan lansia. Jumlah usia produktif atau angkatan kerja tersebut sebesar 48 % atau hampir separuh penduduk Desa Karanggandu, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada setiap perencanaan pengelolaan dan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan hasil perencanaan yang menyangkut wilayah pesisir.

4.2.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sarana pendidikan di Desa Karanggandu sangat terbatas. Sarana tersebut antara lain 3 unit Taman kanak-kanak (TK), 5 unit Sekolah Dasar (SD), 1 unit SLTA, dan 1 unit Lembaga Pendidikan Agama Islam. Hal ini merupakan hambatan bagi penduduk Desa Karanggandu berdasarkan ilmu pada jenjang yang lebih tinggi. Daftar penduduk Desa Karanggandu berdasarkan pendidikan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Karanggandu berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah(orang)
1	Tidak sekolah	202
2	Sedang sekolah	1243
3	Tidak Tamat Sekolah	660
4	Tamat SD/ sederajat	519
5	Tamat SMP/ sederajat	230
6	Tamat SMA/ sederajat	240
7	Perguruan Tinggi	68

Sumber :Laporan Tahunan Desa Karanggandu Tahun 2014

4.2.4 Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Karanggandu sangat beraneka ragam, diantaranya adalah bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, jasa dan pegawai negeri.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Karanggandu berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani/nelayan	2.575
2	Buruh tani	2705
3	Pegawai Negeri Sipil	32
4	Pengrajin industri rumah tangga	250
5	Pedagang keliling	15
6	Peternak	13
7	Bidan swasta	1
8	Pensiunan TNI/POLRI	4

Sumber :Laporan Tahunan Desa Karanggandu Tahun 2014

Data tabel 4 menunjukkan bahwa mata pencaharian terbesar adalah petani yang mencakup juga nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan penduduk akan sumberdaya alam berupa tanah atau lahan dan sumberdaya perikanan demikian besar. Dominasi mata pencaharian di bidang pertanian dan perikanan tersebut diharapkan tidak mengganggu kelestarian alam. Agar produktifitas penduduk dan keberadaan sumberdaya alam serta sumberdaya perikanan tetap terjaga maka diperlukan upaya-upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan perairan secara baik dan berkesinambungan.

4.3 Keadaan Umum Perikanan Desa Karanggandu

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini memiliki wilayah seluas 1.205,22 km² yang dihuni oleh ±700.000 jiwa. Kabupaten Trenggalek secara ketinggian tempat terdiri dari 2/3 wilayah pegunungan dan 1/3 lainnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 690 meter di atas permukaan air laut. Dua pertiga wilayah Kabupaten Trenggalek yang merupakan kawasan pegunungan dataran rendah memiliki ketinggian antara 0 hingga di atas 100 meter di atas permukaan laut, dan ketinggian tersebut 53,8 % berketinggian 100-500 m.

Secara administrasi seluruh wilayah kecamatan Watulimo terbagi atas 12 desa. Desa-desanya yang mempunyai wilayah pesisir pantai dan menjadi pusat kegiatan perikanan adalah Desa Karanggandu, prigi, dan Tasikmadu (Maroeto, 1999).

Perikanan dan pertanian merupakan mata pencaharian pokok masyarakat Desa Karanggandu, jumlah masyarakat yang bekerja di sektor perikanan dan pertanian adalah sejumlah 46% dan yang lain bekerja sebagai buruh tani, pengrajin industry dan pegawai negeri sipil. Banyak kegiatan di Desa Karanggandu yang menunjang sektor perikanan selain penangkapan ikan, seperti misal memanfaatkan hutan mangrove untuk budidaya ikan dan kepiting, pembuatan minuman dan kue dari buah mangrove dan ekowisata mangrove.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Jaminan Sosial Sumberdaya Mangrove

Jaminan sosial menurut Benda-Beckam (1994) adalah upaya-upaya individu, kelompok sosial, atau organisasi untuk menanggulangi ketidakpastian yang menyangkut eksistensi mereka, yaitu yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan air dan makanan, tempat perlindungan, pemeliharaan dan kesehatan fisik mental, serta pendapatan dan pendidikan.

Masyarakat Karanggandu dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan potensi yang dimiliki sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumberdaya alam yang dimanfaatkan berupa hutan mangrove yang memiliki manfaat baik secara langsung dan tidak langsung bagi masyarakat. Desa Karanggandu memiliki area hutan mangrove paling luas di Kabupaten Trenggalek dengan keanekaragaman biota yang sangat tinggi seperti kepiting bakau, berbagai jenis ikan air payau, beraneka ragam jenis kerang dan siput, serta habitat burung, biawak, musang air dan hewan lainnya.

Kemandirian masyarakat Karanggandu ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial (social security) yang telah dirancang oleh penduduk untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan tanaman mangrove. Masyarakat Karanggandu mempunyai nilai budaya yang berorientasi selaras dengan alam, sehingga pemanfaatan sumberdaya mangrove adalah pemanfaatan adaptif dengan kondisi alam. Selain itu kultur budaya berdasarkan pada keakraban, kekeluargaan, loyalitas dan menjunjung tinggi norma. Masyarakat Desa Karanggandu merupakan struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, tatanan hidup, dan kegiatan masyarakat relatif homogen dan masing-masing individu merasa

mempunyai kepentingan yang sama dan bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah disepakati bersama (Yunalinda, 2010)

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pantai selain terumbu karang dan lamun. Secara ekologis, hutan mangrove dapat berfungsi sebagai stabilitas atau keseimbangan ekosistem, sumber unsur hara, sebagai daerah asuhan, daerah mencari makan, dan daerah pemijahan. Secara ekonomis, ekosistem mangrove dapat dijadikan sebagai areal budidaya, penangkapan, obyek wisata, dan sumber kayu bagi masyarakat. Selain hal tersebut, mangrove merupakan salah satu hutan alamiah yang unik dan mempunyai nilai ekologis dan ekonomis yang cukup tinggi. Hutan mangrove dapat menghasilkan bahan dasar untuk keperluan rumah tangga dan industri (Amran, 2014).

Kawasan hutan mangrove yang dilestarikan di Pancer Cengkong berada di wilayah administrasi Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo, yang memiliki area hutan mangrove paling luas yaitu sekitar 87 ha dengan kondisi rusak 5 ha. Ekosistem mangrove yang ada di pesisir Cengkong terdiri dari beberapa jenis yang meliputi *Bruguiera gymnoriza* (tepung roti), *Bruguiera cylindrical*, *Bruguiera sixangula*, *Avicennia marina* (pakan ternak lele, obat keputihan), *Avicennia lanata*, *Ceriops decandra*, *Rhizophora apiculata*, *Rhizonata mucronata*, *Sonneratia alba*, *Sonneratia caseolaris* (bahan sirop, sabun, makanan), *Ageiceras floridum* dan *Ageiceras corniculatum* (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2010). Pada tahun 2003 sampai 2007 hutan mangrove di Pancer Cengkong terjadi kerusakan hingga mencapai 50%, tahun 2008 dilakukan reboisasi seluas 1 ha dengan prakarsa Dinas Kelautan dan Perikanan Trenggalek. Sehingga sampai dengan tahun ini rusak hanya mencapai kira-kira 1%. Menurut Pak Imam selaku ketua Pokmaswas Kejung Samudra, kondisi hutan mangrove di Desa Karanggandu

saat ini sudah jauh lebih baik dari pada dulu, karena sudah terorganisasi pengelolaanya oleh Pokmaswas Kejung Samudra.



4 (a)

4(b)

Gambar 4.(a) dan (b). Kondisi Areal Hutan Mangrove Di Pancer Cengkong

Kerusakan ekosistem mangrove umumnya disebabkan oleh dua faktor utama: secara alami dan buatan manusia. Kerusakan alami seperti badai topan dapat merusak dan memporak-porandakan ekosistem mangrove, sedangkan kerusakan hutan mangrove akibat campur tangan manusia erat kaitannya dengan konversi lahan mangrove menjadi tambak dan penebangan untuk pemanfaatan kayu dari hutan mangrove (Nybakken, 1998). Hutan mangrove di Pancer Cengkong terjadi kerusakan sebagian besar akibat kepentingan masyarakat, seperti penebangan pohon mangrove yang digunakan untuk kayu bakar dan bahan arang, penebangan untuk lahan tambak udang, penebangan untuk dikonversi menjadi area perkebunan dan lahan pertanian. Selain itu pengunjung ekowisata mangrove sering membuang sampah sembarangan di area hutan mangrove yang dapat mengganggu kelestarian dan keindahan hutan mangrove, padahal sudah disediakan fasilitas tempat sampah di dalam area hutan mangrove.

Ekosistem hutan mangrove mempunyai sifat dan karakteristik yang khas baik dari jenis tumbuhan, biota yang ada serta sebagai habitat bagi aneka jenis hewan dan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Sugianto dari hasil

wawancara sebagai anggota Pokmaswas Kejung Samudra, bahwa manfaat hutan mangrove bagi manusia sangat luas dengan cara memanfaatkan sumberdaya yang ada. Seperti kawasan hutan mangrove di Pancer Cengkong manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya Pokmaswas Kejung Samudra. Hutan mangrove di Desa Karanggandu memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut :

1. Fungsi fisik, hutan mangrove merupakan pelindung hutan daratan yang banyak dihuni oleh berbagai jenis biota perairan serta beberapa jenis satwa.

Secara fisik hutan mangrove berfungsi :

- Menahan dan melindungi daratan dari pengaruh gelombang dan arus
- Menjaga kestabilan garis pantai
- Pelindung tepi pantai atau sungai dari abrasi
- Penahan lumpur
- Mempercepat perluasan lahan
- Filter intrusi air laut dan polusi industri yang mengeluarkan limbah logam berat (Anwar et al., 1984)

2. Fungsi biologi, fungsi biologi mangrove sangat berkaitan dengan perikanan
 - Daerah asuhan (*nursery ground*) bagi biota yang hidup pada ekosistem mangrove,
 - Daerah mencari makan (*feeding ground*), pada ekosistem mangrove tersedia banyak makanan bagi biota-biota yang mencari makan karena mangrove merupakan produsen primer yang mampu menghasilkan sejumlah besar detritus dari daun dan dahan,
 - Daerah pemijahan (*spawning ground*) dari beberapa jenis ikan dan udang,

- Penyuplai unsur-unsur hara utama di pantai, khususnya daerah lamun dan terumbu karang (Kusmana, 2003)
3. Fungsi ekonomi hutan mangrove di Pancer Cengkong (Bpk. Sugianto anggota Pokmaswas Kejung Samudra)
- Mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, seperti pencari kepiting
 - Kayu dari tumbuhan mangrove dapat dimanfaatkan untuk kayu bakar, namun di Cengkong kegiatan ini dilarang
 - Wahana rekreasi atau tempat pariwisata

5.1.1 Aktifitas Ekonomi Sebagai Jaminan Sosial Sumberdaya Mangrove

Masyarakat Desa Karanggandu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang relative sama yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada yaitu sumberdaya mangrove. Substrat yang terdapat pada ekosistem mangrove adalah tempat yang sangat disukai oleh biota yang hidup di dasar perairan atau bentos. Kehidupan beberapa biota tersebut erat kaitanya dengan distribusi ekonomi mangrove itu sendiri. Beberapa sumberdaya perairan yang sering ditemukan di ekosistem mangrove adalah ikan belanak (*Mugilidae*), ikan gelodok (*Periophthalmus, sp*), ikan kuweh (*Carangidae*), ikan kapasan, alu-alu, ikan kekemek, gelama, krot (*Scianidae*), ikan barakuda, tancak (*Sphyraenidae*), serta jenis kepiting dan kerang-kerangan. Hasil pengamatan di lapang, Pancer Cengkong Desa Karanggandu merupakan lokasi strategis untuk budidaya keramba kepiting bakau dan kerang dengan menggunakan sistem silvofishery. Silvofishery adalah sistem pengelolaan tambak yang berasosiasi dengan hutan mangrove yang mempunyai makna tumpang sari antara usaha perikanan dengan hutan mangrove.

Masyarakat Desa Karanggandu mengelola sumberdaya mangrove dengan baik dan sesuai dengan kearifan lokal yang ada, agar jaminan sumberdaya mangrove tetap terjamin. Adapun aktifitas-aktifitas ekonomi masyarakat sebagai jaminan sosial sumberdaya mangrove adalah :

1) Ekowisata

Ekowisata hutan mangrove di Desa Karanggandu dibangun mulai bulan Juli 2012 dengan tujuan memperkenalkan peran dan fungsi serta manfaat hutan mangrove, media edukasi, dan sebagai tempat perlindungan dan pelestarian aneka jenis flora dan fauna. Dengan adanya ekowisata hutan mangrove masyarakat juga membuka warung-warung di area hutan mangrove, penyewaan payung dengan harga sewa Rp 3.000 per payung, dan Jasa parkir Rp 5.000 untuk motor dan mobil Rp 10.000.



Gambar 5. Ekowisata Mangrove Pancor Cengkong

2) Budidaya kepiting bakau

Kegiatan budidaya kepiting di Desa Karanggandu dilakukan pada tahun 2010 yang hasilnya sudah dirasakan oleh masyarakat khususnya anggota Pokmaswas Kejung Samudera. Permintaan kepiting konsumsi sangat tinggi dan harga jual yaitu Rp 60.000 – Rp 90.000 per kilogram.



Gambar 6. Hasil Budidaya Kepiting Bakau

Teknis budidaya kepiting bakau yang dilakukan yaitu dengan cara pembuatan keramba dari bambu dengan ukuran rata-rata 1 x 0,5 m yang kemudian disekat-sekat menjadi ruangan-ruangan kecil sekitar 20 cm x 20,5 cm. Satu ruangan diisi 1 ekor kepiting bakau, bibit diperoleh dari hasil tangkapan yang ukurannya belum memenuhi kebutuhan pasar.

3) Budidaya kerang darah dan kijing

Jenis kerang yang dibudidayakan oleh POKMASWAS adalah kerang darah (*Annadara* sp) dan jenis kijing/totok. Teknis budidaya dilakukan dengan cara menebar benih-benih kerang di kawasan perairan dengan substrat lumpur berpasir di daerah yang terlindung arus deras, kemudian diberi pagar pembatas dengan menggunakan bilah bambu.



Gambar 7. Aktivitas Mencari Kerang

Kegiatan budidaya kerang ini belum kearah komersial, namun lebih dititik beratkan kepada kegiatan pengendalian atau pelestarian. Biasanya masyarakat mencari kerang untuk di konsumsi sendiri.



Gambar 8 . Hasil budidaya kerang

4) Pengolahan buah mangrove

Mangrove dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk sirup, kue dan selai. Jenis mangrove yang dimanfaatkan adalah jenis bogem yang banyak tumbuh di kawasan hutan mangrove Pantai Cengkong. Di Cengkong, buah mangrove diolah menjadi sirup dan dijual seharga Rp 5.000/ *cup*.



Gambar 9. Pengolahan Buah Mangrove Menjadi Sirup

5) Pembibitan

Pokmaswas Kejung Samudra telah melakukan pembibitan mulai tahun 2011 dengan jumlah bibit sebanyak 35.000 batang. Harga bibit mangrove bervariasi antara Rp 1.000 – Rp 3.000 per batang. Jumlah bibit yang dihasilkan

sebagian besar permintaan dari sejumlah dari seperti Kecamatan Panggul dan Kecamatan Munjungan, bahkan dari Kabupaten Trenggalek.



Gambar 10. Pembibitan Tanaman Mangrove

6) Budidaya Lebah madu

Lebah madu banyak bersarang di kawasan hutan mangrove, oleh karena itu Pokmaswas melakukan kegiatan penunjang yaitu budidaya lebah madu yang hasilnya juga memuaskan.

Sebelum diadakannya rehabilitasi dan keadaan mangrove di Pancer Cengkong masih memprihatinkan, Salah satu indikasi kerusakan hutan mangrove adalah terjadi penurunan volume dan keragaman jenis hasil tangkapan, dimana rata-rata 56,32% dari jenis-jenis ikan yang biasa ditangkap oleh nelayan menjadi langka (sulit didapat) dan 35,36% diantaranya bahkan hilang (tidak pernah lagi ditangkap). Selain itu, diperoleh hasil bahwa terjadi penurunan pendapatan akibat kerusakan ekosistem mangrove. Hal ini dikarenakan jenis ikan dan kepiting bakau yang selama daur ulang hidupnya memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap ekosistem mangrove (Purwoko, 2007).

5.2 Peran Pemerintah Dalam Bidang Pengelolaan Mangrove

Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan beberapa proyek rehabilitasi untuk menjaga kelestarian sumberdaya mangrove khususnya di daerah Pancer Cengkong Desa Karanggandu. Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek secara mandiri dan dengan dukungan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Adapun kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di Desa Karanggandu adalah berupa bantuan pemberian bibit seperti yang terlihat pada Tabel 5. Sebagai berikut

Table 5. Proyek Rehabilitasi Mangrove di Pancer Cengkong Desa Karanggandu

No	Tahun Rehabilitasi	Terehabilitasi (Batang)
1	2002	6.000
2	2007	15.000
3	2008	10.000
4	2009	15.000
5	2010	10.000
6	2014	7.000

Sumber : Laporan tahunan DKP Trenggalek 2014



11 (a)



11 (b)



11 (c)



11(d)

Gambar 11 (a), (b), (c) dan (d) Kegiatan Rehabilitasi Mangrove

Hutan mangrove di Pancer Cengkong pernah mengalami kerusakan parah yang terjadi akibat aktivitas masyarakat yang menebang pohon mangrove untuk dikonversi menjadi lahan pertanian dan perkebunan serta sebagai kayu bakar dan bahan arang. Sehingga perlu dilakukan tindakan atau rehabilitasi mangrove oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melalui penanaman 6.000 batang pada tahun 2002, 15.000 batang pada tahun 2007, 10.000 batang pada tahun 2008, 15.000 batang pada tahun 2009, 10.000 batang pada tahun 2010 dan pada tahun 2014 menanam sebanyak 7.000 batang. Selain penanaman pohon, Dinas Perikanan dan Kelautan juga melakukan budidaya kepiting bakau mulai tahun 2010 s/d sekarang serta penanaman cemara udang pada tahun 2011 sampai dengan sekarang dan pembangunan jembatan ekowisata hutan mangrove pada bulan Juli 2011.

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek melakukan rehabilitasi terhadap sumberdaya mangrove di Pancer Cengkong melalui kegiatan pembangunan KBR (Kebun Bibit Rakyat) dan penanamannya 40.000 bibit mangrove pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 sebanyak 7.500 batang.

Kegiatan rehabilitasi hutan mangrove ini dilakukan untuk memulihkan kondisi ekosistem sumberdaya bakau yang telah rusak dan meningkatkan daya dukung lingkungan bagi biota yang berarti meningkatkan peluang usaha di sekitar hutan bakau. Rehabilitasi ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat di Desa Karanggandu untuk menjaga ekosistem mangrove. Dengan terjaga kelestarian hutan mangrove sebagai lingkaran pantai maka keberadaan usaha yang dilakukan masyarakat akan terjamin.

Kegiatan rehabilitasi kawasan hutan mangrove yang dilaksanakan di Desa Karanggandu memiliki ruang lingkup diantaranya tahapan persiapan, sosialisasi, pembinaan teknis, penanaman bakau hingga pemeliharaan. Kegiatan persiapan bertujuan mendapatkan informasi mengenai kondisi hutan mangrove. Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat sekitar hutan mangrove akan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya mangrove dan tujuan dilaksanakannya rehabilitasi mangrove. Sedangkan pembinaan teknis dilakukan agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatan rehabilitasi secara efektif dan efisien.

Kegiatan pengawasan hutan mangrove di Kecamatan Watulimo dilakukan oleh Kru Kapal Patroli beserta Polisi Air Kabupaten Trenggalek, perhutani dan anggota Pokmaswas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan tindak pidana dalam pengelolaan sumberdaya mangrove. Selain operasional pengawasan, pemerintah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek melakukan upaya untuk melakukan pemasangan papan larangan di kawasan konservasi hutan mangrove di pesisir Desa Karanggandu.



gambar 12. Papan larangan di kawasan Pancer Cengkrong

Pemasangan papan larangan di kawasan konservasi hutan mangrove bertujuan untuk mengurangi pelanggaran masyarakat yang berdampak merusak hutan mangrove. Kesepakatan lokal yang telah ditetapkan dalam papan larangan tersebut merupakan hasil musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan masyarakat Desa Karanggandu yang sudah diundangkan ke dalam Peraturan Daerah No 10 tahun 2004 tentang pengelolaan sumberdaya perikanan di Trenggalek. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan tidak ada benturan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek. Namun adanya pemasangan papan larangan kurang efektif dilakukan, karena hanya dipasang dalam satu kawasan hutan mangrove. Oleh karena itu DKP Trenggalek berupaya memperbanyak papan larangan di setiap kawasan hutan mangrove.

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek bersama dengan kelompok masyarakat Desa Karanggandu dapat memberikan kontribusi terhadap lingkungan yang cukup besar. Hal ini terbukti dengan meningkatnya biota dan jenis ikan yang ada di sekitar kawasan hutan mangrove. Untuk mendukung keberhasilan terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pengawasan hutan mangrove Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada kelompok masyarakat pengawas Kejung Samudra sebagai sarana pemantauan di kawasan hutan mangrove berupa kapal penangkap ikan dan alat komunikasi (HT).

Pemerintah telah menjembatani kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan masyarakat Karanggandu (*Social Bridging*) dengan menyediakan bibit mangrove dan pengadaan biaya pelaksanaannya. Untuk penanaman bibit bakau sendiri diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kejung Samudra secara sukarela dan tanpa pamrih. Pembentukan Pokmaswas ini sendiri dikukuhkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

5.3 Upaya Masyarakat Karanggandu dalam meningkatkan Jaminan Sosial Sumberdaya Mangrove

Masyarakat Desa Karanggandu sebagian besar memenuhi kebutuhan hidupnya dari potensi sumberdaya alam dan sumberdaya perikanan khususnya sumberdaya mangrove. Partisipasi masyarakat di sekitar hutan mangrove Desa Karanggandu mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelestarian hutan mangrove, agar jaminan sosial sumberdaya mangrove dalam masyarakat tetap terjamin. Partisipasi tersebut dapat secara individual maupun kelompok masyarakat. Jangan sampai terjadi eksploitasi berlebihan terhadap hutan mangrove, karena hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan jaminan sosial yang telah terbentuk. Upaya pengelolaan kawasan hutan mangrove dapat berjalan dengan baik karena adanya partisipasi masyarakat dan kerjasama kelompok masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal dengan tegas terhadap perusakan kawasan hutan mangrove. Pentingnya menerapkan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan mangrove karena setiap komunitas masyarakat memiliki adat istiadat, nilai-nilai sosial maupun kebiasaan yang berbeda dari satu tempat ketempat lain. Perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya perbedaan pula dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan mangrove. Oleh karena itu dalam proses pengelolaan mangrove perlu memperhatikan masyarakat dan

kebudayaan, baik sebagai bagian dari objek maupun subjek pengelolaan tersebut. Contoh kearifan lokal masyarakat yang sudah berkembang di Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan antara lain : Sasi Laut di Maluku, Panglima Laot di Nanggro Aceh Darussalam dan Tradisi Awig-awig di Nusa Penida Bali.

Kesepakatan lokal yang telah dibuat oleh masyarakat Karanggandu merupakan aturan yang mengikat masyarakat sekitar untuk tetap melestarikan sumberdaya mangrove. Masyarakat takut akan denda dan sanksi yang diterima jika dengan sengaja melakukan kerusakan terhadap kawasan hutan mangrove. Secara bersama-sama masyarakat melakukan pengawasan terhadap sumberdaya mangrove dari perusakan. Menurut (Yunalinda, 2010), adapun kesepakatan lokal yang menetapkan sanksi terhadap pelaku pengerusakan ekosistem hutan mangrove dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- Ringan, jika pelaku menebang 1 atau 2 pohon mangrove akan di beri peringatan dan pembinaan sebanyak 3 kali.
- Sedang, pelaku dikenakan denda untuk mengganti sejumlah pohon mangrove yang telah ditebang dengan mengganti sejumlah Rp 100.000/batang. Uang akan masuk ke kas kelompok masyarakat pengawas Kejung Samudra.
- Berat, pelaku penebangan hutan mangrove dan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan metode yang merusak hutan mangrove, melakukan konversii ekosistem mangrove untuk kegiatan industry dan pemukiman, dikenakan sanksi pidana kurungan penjara paling singkat 2 tahun dan maksimal 10 tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp 2.000.000.000 paling banyak Rp 10.000.000.000.

Kesepakatan lokal yang dibuat diperuntukkan bagi siapa saja yang merusak hutan mangrove dan sumberdaya pesisir lainnya, tak terkecuali masyarakat Desa Karanggandu sendiri. Hasil wawancara dengan bapak Imam selaku ketua Pokmaswas Kejung Samudra, pada tahun 2008 ada pengambilan/penebangan hutan bakau yang dilakukan oleh Bapak Slamet Desa Karanggandu, kemudian salah satu anggota Pokmaswas Kejung Samudra melaporkan tindakan bapak Slamet ke SATPOL Air. Karena penebangan yang dilakukan hanya 2 batang maka pelanggar hanya diberi pembinaan dan peringatan agar tidak mengulangi lagi. Jika pelaku mengulangi lagi akan dikenakan sanksi atau denda untuk mengganti sejumlah tanaman mangrove yang telah ditebang atau mengganti sejumlah uang Rp 100.000 per batang.

Kesepakatan-kesepakatan lokal yang mengatur mengenai penggunaan/pemanfaatan sumberdaya mangrove tersebut kemudia disepakati sebagai Peraturan Desa Desa Karanggandu. Bahkan kesepakatan lokal yang dibuat tersebut sekarang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 10 tahun 2004, salah satunya berbunyi bahwa daerah perlindungan laut adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari usaha pemanfaatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan atau kesepakatan masyarakat lokal. Dalam PERDA No. 10 tahun 2004 juga menyebutkan bahwa setiap orang yang berada di kawasan sumberdaya perikanan seperti masyarakat di Desa Karanggandu juga memiliki kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem sumberdaya perikanan, seperti :

1. Menjaga kebersihan lingkungan
2. Menjaga ketertiban

3. Melestarikan fungsi sumberdaya perikanan
4. Melaporkan kepada yang berwenang setiap tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan
5. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
6. Mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
7. Mentaati dan menjunjung tinggi kesepakatan masyarakat setempat dan peraturan yang berlaku.

Seiring berjalannya waktu, untuk mendukung kegiatan pengelolaan sumberdaya mangrove maka masyarakat Desa Karanggandu membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas dalam bidang pelestarian hutan mangrove dengan nama lembaga "Kejung Samudra". Kelompok-kelompok ini menerapkan kesepakatan lokal yang telah ada dalam bidang pengelolaan mangrove secara berkelanjutan, yang mencakup keberlanjutan ekologi, sosial-ekonomi, organisasi dan institusi.

Pokmaswas Kejung Samudra adalah kelompok/lembaga masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan peranan dan partisipasi masyarakat pantai di dalam pembangunan perikanan sehingga terwujud masyarakat pantai yang sejahtera. Anggota Pokmaswas Kejung Samudra adalah masyarakat Desa Karanggandu yang peduli dan sadar akan pentingnya hutan mangrove dengan jumlah anggota 13 orang yang dikukuhkan oleh pada tanggal 3 Juli 2008.

Landasan hukum yang mendasari pembentukan POKMASWAS Kejung Samudra adalah :

- a) PERDA Kabupaten Trenggalek No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Perikanan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
- b) Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 188.45/842/406.060/2008

Adapun tugas dan fungsi Pokmaswas Kejung Samudra adalah :

- 1) Mengawasi kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan mangrove khususnya Desa Karangandu Kecamatan Watulimo
- 2) Melakukan gerakan pembibitan dan penghijauan kawasan hutan mangrove
- 3) Menjaga, merawat dan melestarikan kawasan hutan mangrove
- 4) Sosialisai/pembinaan kepada nelayan/masyarakat tentang manfaat hutan mangrove
- 5) Mencatat dan melaporkan semua kegiatan pengerusakan dan atau pengambilan pasir pantai dan atau penangkapan biota yang tidak bertanggung jawab dikawasan hutan mangrove kepada instansi terkait
- 6) Semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pelestarian hutan mangrove khususnya di Pancer Cengkrong Desa Karangandu.

Perkembangan keanggotaan dan perubahan kepengurusan POKMASWAS Kejung Samudra adalah sebagai berikut :



Tabel 6. Perkembangan keanggotaan

		Tahun			
2008-2010		2011-2013		2014-2015	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Ketua I	Imam Syaifudin	Ketua I	Imam Syaifudin	Ketua I	Imam Syaifudin
Ketua II	Asrory	Ketua II	Asrory	Ketua II	Asrory
Sekretaris	Muasir	Sekretaris	Sudarmanto	Sekretaris	Sudarmanto
Bendahara	Imam Saefudin	Bendahara	Imam Saefudin	Bendahara	Imam Saefudin
Anggota	Djarkasi	Anggota	Djarkasi	KORLAP	Djarkasi
	Manaf		Manaf	HUMAS	Sugit H
	Mukiyat		Mukiyat	Anggota	Mukiyat
	Mukti		Mukti		Mukti
	Sugit H		Sugit H		Manaf
	Sudarmanto		Eko R		Eko R
	Eko R		Sukri		Sukri
	Sukri		Sugeng		Sugeng
	Sugeng		Supanji		Supanji
	Supanji		Sukemi		Sukemi
			Damin		Damin
	Suharni		Suharni		
	Jaeno		Jaeno		
	Narohwi		Narohwi		
	Sujarni		Sujarni		
	Surati		Surati		
	Sulasmis		Sulasmis		

Sumber : POKMASWAS Kejung Samudra, 2015

Perkembangan keanggotaan POKMASWAS Kejung Samudra dari tahun 2008-2015 untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara belum mengalami perubahan, hal ini karena POKMASWAS mempunyai modal sosial yang kuat, yaitu antara lain kepercayaan (*trust*), kebersamaan (*togetherness*), dan pengembangan jejaring kerjasama (*networking development*). Untuk perkembangan keanggotaan, pada awal terbentuknya pada tahun 2008 anggota POKMASWAS berjumlah 14 orang termasuk didalamnya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penambahan anggota hingga sekarang berjumlah 21 anggota. Sarana teknologi yang dimiliki POKMASWAS sudah cukup lengkap dengan adanya HT, kamera digital, mesin ketik, lampu sorot, dan komputer, didukung dengan sarana penunjang lain

seperti pos pengawas, kapal, jaket POKMASWAS, lemari, meja, kentes, dan pelampung. Sarana tersebut menjadi alat dalam pengelolaan sumberdaya mangrove di Pancer Cengkong, mempermudah dalam hal pengawasan dan sebagai alat penunjang kegiatan eduwisata di Cengkong.

Tabel 7. Sarana

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Pos pengawas	1	Unit
2	Kapal	1	Unit
3	HT	6	Buah
4	Jaket POKMASWAS	25	Buah
5	Kamera digital	1	Unit
6	Mesin ketik	1	Unit
7	Lemari kecil	2	Buah
8	Meja kerja	3	Buah
9	Lampu sorot	1	Buah
10	Pentongan	1	Buah
11	Kentes	4	Buah
12	Baju Pelampung	15	Buah
13	Komputer	1	Set

Sumber : POKMASWAS Kejung Samudra, 2015

Pelaksanaan dan pengawasan terhadap kesepakatan lokal untuk upaya melindungi dan mengelola hutan mangrove terjalin kerjasama yang baik antar masyarakat dan kelompok pengawas masyarakat. Mereka membuat perencanaan pengelolaan wilayah perlindungan melalui keputusan bersama, mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan wilayah yang dilindungi untuk kepentingan bersama, saling melapor apabila terjadi pelanggaran dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melanggar. Masyarakat yang sadar akan pentingnya hutan mangrove mulai meninggalkan aktifitas-aktifitas yang dapat merusak kelestaraan ekosistem mangrove.

Setiap bulan diadakan pertemuan untuk membahas masalah-masalah perikanan yang terjadi dan mencari solusi jika terdapat masalah yang dihadapi masyarakat dan kelompok pengawas masyarakat. Pertemuan ini juga diadakan

untuk mensosialisasikan pentingnya pengelolaan sumberdaya perikanan bagi masa depan perikanan Di Pantai Prigi secara luas dan Pancer Cengkong pada khususnya.

Keterlibatan masyarakat Desa Karanggandu secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya mangrove disebut pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Aspek positif dari pengelolaan berbasis masyarakat adalah masyarakat lebih mampu mengidentifikasi, menilai dan memformulasikan permasalahannya baik fisik, sosial kultural maupun ekonomi dan kesehatan lingkungan, membangun visi dan aspirasi dan kemudian memprioritaskan, intervensi, merencanakan, mengelola, memonitor dan bahkan memilih teknologi yang tepat serta masyarakat termotivasi untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan.

Konsep pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat kemudian mengalami perkembangan yang disebut dengan Co-Management. Menurut Pomeroy (2003) Co-Management adalah pembagian tanggung jawab dan otoritas dalam pengelolaan sumberdaya antara pemerintah dan stakeholder. Dengan demikian dengan Co-Management akan mengurangi adanya tumpang tindih kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan perikanan, contohnya areal hutan mangrove. Sebagian masyarakat memanfaatkannya sebagai lahan pertanian karena merasa jika hanya berupa hutan mangrove saja tidak menguntungkan, dan sebagian masyarakat beranggapan bahwa hutan mangrove tersebut harus dilestarikan keberadaannya karena memiliki peran yang sangat penting. Penerapan Co-Management akan berbeda-beda di setiap daerah dan tergantung pada kondisi spesifikasi lokasi.

Indonesia mempunyai ragam budaya dan adat istiadat yang tersebar seantero nusantara, dari sabang sampai merauke. Contoh tradisi lokal yang ada di Indonesia guna mengelola sumberdaya adalah Panglima Laot di Nanggro

Aceh Darussalam, Awig-Awig di Nusa Penida Bali, Sasi di Maluku dan aturan lokal yang berada di Desa Karanggandu. Fenomena kebhinekaan tersebut memberikan ragam bentuk pengelolaan sumberdaya, tetapi tujuan utama pengelolaan relatif sama, yaitu mengelola sumberdaya dan membagi alokasi sumberdaya secara adil bagi para pemanfaat sumberdaya tersebut sehingga keharmonisan pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya.

Berdasarkan keadaan yang di lapangan ada beberapa permasalahan yang terjadi di kawasan hutan mangrove Desa Karanggandu jika dibandingkan dengan model Co-Management, antara lain :

- 1) Banyaknya konservasi hutan mangrove menjadi kebun, tambak ikan dsb
- 2) Koordinasi antar instansi pembinaan masih kurang optimal sehingga terjadi tumpang tindih kegiatan program
- 3) Kurangnya kerjasama antar masyarakat maupun kelompok dalam kegiatan pengelolaan
- 4) Kerusakan semai hasil rehabilitasi akibat limbah pengolahan ikan
- 5) Kerusakan tanaman akibat diinjak/dimakan kerbau masyarakat, masih saja ada masyarakat yang membiarkan ternak mereka berkeliaran di area hutan mangrove dan memakan daun-daun mangrove
- 6) Pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan mangrove masih relative rendah, seperti masih saja ada masyarakat yang kurang tahu akan manfaat hutan mangrove bagi kelangsungan hidupnya. (Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan, 2014).

Dengan adanya suatu sistem pengelolaan secara berkelanjutan maka diharapkan sumberdaya mangrove yang ada di Desa Karanggandu tetap lestari dan didukung akses yang luas terhadap sumberdaya mangrove yang tersedia maka jaminan sosial sumberdaya mangrove yang terbentuk dalam masyarakat akan berkelanjutan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aktifitas-aktifitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat Pancer Cengkong sebagai jaminan sosial sumberdaya mangrove adalah dengan pembangunan ekowisata mangrove, budidaya kepiting bakau, budidaya kerang-kerangan, pengolahan buah mangrove dan pembibitan tanaman mangrove. Dengan memanfaatkan sumberdaya mangrove, masyarakat di Pancer Cengkong dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mengelola hutan mangrove dengan baik. Masyarakat Desa Karanggandu melakukan kegiatan pengelolaan sumberdaya dengan menerapkan kearifan lokal serta pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Kejung Samudra.
2. Peran pemerintah terhadap keberlanjutan sumberdaya mangrove di Pancer Cengkong Desa Karanggandu antaralain : Kegiatan rehabilitasi yang dimulai pada tahun 2002-2014 dengan penanaman 6.000 batang mangrove, budidaya kepiting bakau mulai tahun 2010, penanaman cemara udang pada tahun 2011 sampai dengan sekarang, pembangunan jembatan ekowisata mangrove pada tahun 2011, pembinaan, pembentukan dan penguatan organisasi Kelompok Masyarakat Pengawas Kejung Samudra serta ditetapkannya kawasan mangrove ke dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Trenggalek.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengembangkan jaminan sosial sumberdaya mangrove yang telah ada antara lain dengan

ikut aktif dalam kegiatan perencanaan, penanaman, perawatan dan pengawasan hutan mangrove di Pancer Cengkong Desa Karanggandu, serta memanfaatkan sumberdaya mangrove dengan tidak merusak ekosistem mangrove.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah seharusnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan mangrove perlu ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan produk mangrove masih relatif rendah. Sehingga pelatihan pengolahan produk mangrove perlu ditingkatkan sekaligus dibantu pemasarannya oleh pihak yang berwenang.
2. Bagi masyarakat hendaknya meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pengelolaan dan pengawasan terhadap sumberdaya mangrove sertamemiliki kesadaran terhadap kesepakatan atau hukum yang berlaku yang mengatur tentang sumberdaya mangrove yang merupakan jaminan sosial bagi keberlangsungan hidupnya.
3. Bagi peneliti hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut tentang pentingnya jaminan sosial sumberdaya mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

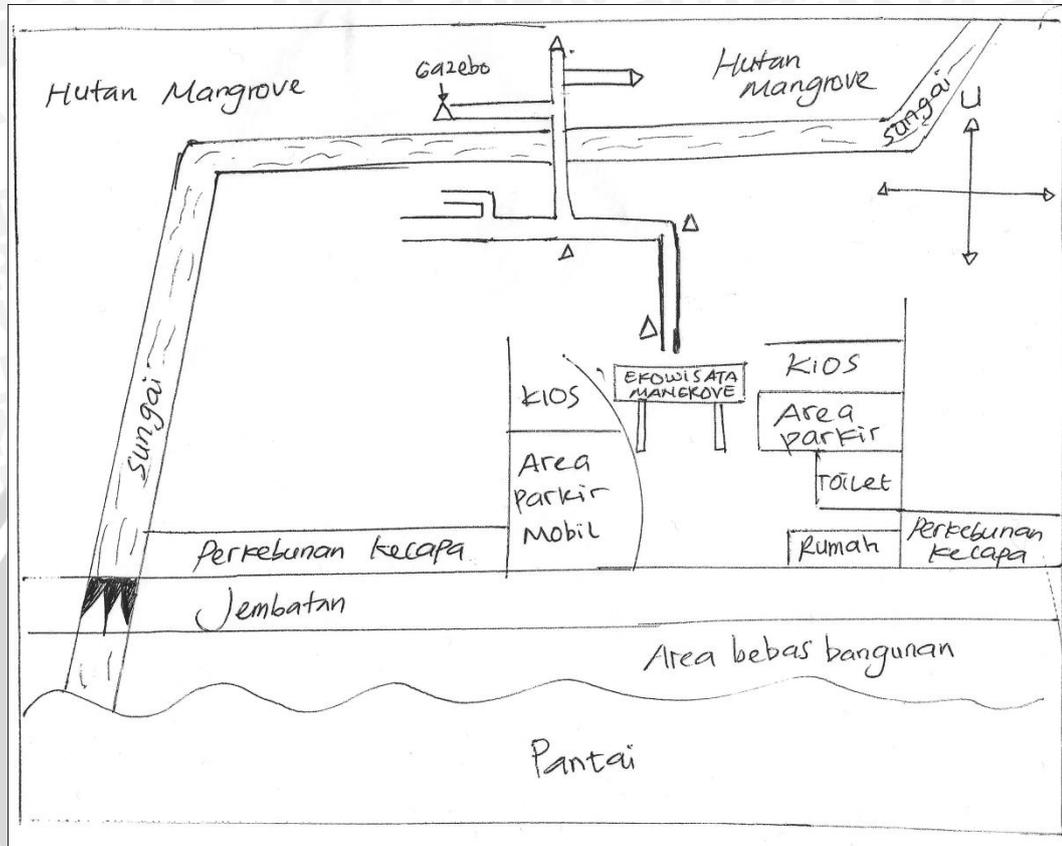
- Adrianto L, Azis N. 2006. Valuasi Ekonomi Sumberdaya Mangrove Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebuah Pendekatan Permintaan. Malang, 20-21 Februari. Malang : Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya.
- Amran S. 2014. Potensi Ekologis Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Wilayah Pesisir. Makassar: PT. Penerbit IPB Press
- Anwar J, Sengli J, Damanik, Hasim N, Whitten AS. 1984. Ekologi Hutan Sumatra. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Benda, Beckman. 2001. Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Bengen D.G. 1998. Ekosistem Dan Sumberdaya Hutan Mangrove. Makalah dalam Pelatihan Singkat Perlindungan Lingkungan Mangrove dan Tambak di Bogor 19 – 22 Oktober 1998.
- Charlea A. 2001. *Sustainable Fisheries System*. United Kingdom : Blackwell Science.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Trenggalek. 2010. Data dan Informasi Statistik Perikanan dan Kelautan Tahun 2010. Trenggalek.
- Direktorat Bina Program Kehutanan. 1982. Keadaan Hutan Indonesia. Jakarta: Direktorat Jendral Kehutanan Departemen Kehutanan Pertanian RI.
- I Nyoman. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, Nurjaya. 2008. Pengelolaan.
- Joshian. 2011. Pengelolaan Ekosistem Mangrove Pulau-Pulau Kecil Taman Nasional Bunaken Berbasis Kerentanan. Jurnal Agrisains. FPIK. Institut Pertanian Bogor. 181 halaman.
- Kusmana C. 2003. Manajemen Hutan Mangrove di Indonesia. Bogor: Lab. Ekologi Hutan. Fak. Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Kusmana C. 2003. Teknik Rehabilitasi Mangrove. Bogor: Fakultas Kehutanan Institusi Pertanian Bogor.
- Maroeto. 1999. Pola Penataan Ruang Dalam Usaha-Usaha Konservasi Pada Wilayah Hutan Mangrove Di Daerah Teluk Prigi, Kabupaten Trenggalek. Jurnal Pertanian MAPETA ISSN.
- Muttaqin. 2012. Tata Kelola Laut Aceh. Banda Aceh: Pusat Studi Hukum Adat Laut Unsyiah.

- Nybakken. 1988. Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis (Terjemahan). Jakarta: PT. Gramedia.
- Pokmaswas. 2012. Profil Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kejung Samudra.Trenggalek.
- Rokhimin, Dahuri. 2002. Pengolahan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu. Jakarta: Sinar Geofisika.
- Soerianegara. 1987. Mengenal Hutan Mangrove. Panduan Teknis di Lapangan. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Sugandhy. 1993. Pemanfaatan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Lautan. Makalah Lokakarya Pemantapan Strategi Pemanfaatan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Pembangunan Jangka Panjang tahap kedua. Jakarta.
- Sugiono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Susilo, BS. 2003. Keberlanjutan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil : Studi Kasus Kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Pari Kepulauan Seribu DKI Jakarta [Disertasi]. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Susilo, Edi, Kliwon Hidayat, Rachmad Syafaat, Muhammad Musa, Pudji Purwanti dan Erlinda Indrayani. 2007. Daya Adaptasi dan Jaminan Sosial Masyarakat dalam Rangka Mencapai Ketahanan Pangan Domestik. Laporan Penelitian (Dinamika Kelembagaan Lokal Pengelola Sumberdaya Perikanan Kawasan Pesisir). Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB – Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi.
- Yunalinda, Ivarilly, Edi Susilo dan Pudji Purwanti. 2010. Jaminan Sosial Sumberdaya Perikanan Pada Masyarakat Nelayan di Pantai Damas, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Brawijaya. Malang.

Lampiran 1. Peta Kabupaten Trenggalek



Lampiran 2. Lay Out Pancer Cengkong



Lampiran 3. Penetapan Kelompok Masyarakat Pengawas



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. R. Ng. Ronggowarsito No. 14 Telp. (0355) 796352

TRENGGALEK

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN TRENGGALEK
 Nomor : 188.45/842/406.060/2008**

**TENTANG
 PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)
 KABUPATEN TRENGGALEK
 TAHUN 2008**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang optimal, bertanggungjawab dan lestari , diperlukan suatu pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat, yang dikenal dengan sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS)
- b. bahwa guna terwujudnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Trenggalek, maka perlu dibentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
 PERTAMA : Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek dengan daftar nama dan Susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : POKMASWAS sebagaimana dimaksud dalam dictum "PERTAMA" Keputusan ini mempunyai tugas utama yaitu melaporkan terjadinya kasus-kasus pidana bidang kelautan dan perikanan, sedangkan fungsi POKMASWAS adalah sebagai pelaksana pengawasan dan pengendali dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di seluruh Kabupaten Trenggalek pada tingkat lapangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Trenggalek
 Pada tanggal : 3 Juli 2008

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN TRENGGALEK



REH SYAHMADA ABDULLAH, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 510 091 307



Lampiran 4. Struktur Organisasi POKMASWAS Kejung Samudra

Struktur organisasi POKMASWAS Kejung Samudra

